

**KEBIJAKAN PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN**
(Studi penelitian pada Penanggulangan Kemiskinan melalui Model Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
2019/1441 H**

**KEBIJAKAN PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN**
(Studi penelitian pada Penanggulangan Kemiskinan melalui Model Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos
Dalam Ilmu Ushuluddin**

**Oleh
Anita Agustina
1531040105**

Jurusan: Pemikiran Politik Islam

**Pembimbing I Drs. Effendi, M. Hum
Pembimbing II Drs. Agustamsyah, M.IP**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2019/1441 H**

ABSTRAK

Munculnya gagasan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Akan tetapi kesadaran dan partisipasi anggota KUBE akan keberlanjutan program tersebut sangat rendah. Islam menghendaki adanya perubahan sosial untuk memberantas ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. diperoleh dari Kecamatan Rajabasa, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dan ketua KUBE Kecamatan Rajabasa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang pemberdayaan, penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberdayaan dalam KUBE serta data dari internet. Jenis KUBE yang dijalankan di Kecamatan Rajabasa tahun 2018-2019 terdapat 3 KUBE di 3 kelurahan 1. Kelurahan Rajabasa Raya, pembuat kerajinan tas dari kain tapis 2. Kelurahan Rajabasa Nyunyi, Peternak sapi 3. Kelurahan Rajabasa pemuka, membuat makan seperti keripik pisang. Dari ketiga KUBE tersebut hanya Kelompok Usaha Bersama Barokah yang aktif dalam membuat kerajinan tas dan pernak pernik lainnya dari kain tapis. Berdasarkan hasil dan pembahasan Kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama khususnya di kecamatan Rajabasa tidak berjalan dengan efektif dikarenakan dari masyarakat atau SDM nya yang tidak menjalankan Kelompok usaha bersama untuk kepentingan bersama melainkan dana dari pemerintah digunakan untuk kebutuhan sendiri bukan untuk kelompoknya. faktor pendukung ialah adanya perhatian dari pemerintah, tersedianya dana atau modal untuk menjalankan Kelompok Usaha Bersama dan juga ada pendampingan dan diberikan bimbingan teknis dan juga pengarahan lainnya untuk Kelompok Usaha Bersama. Dan faktor penghambat nya ialah rasa malas dari anggotanya sendiri faktor malas ini adalah faktor utama dan anggota lebih menyukai simpan pinjam daripada program untuk membuat usaha, pendampingan yang tidak maksimal mengakibatkan ketidak tepat sasaran dalam Kelompok Usaha Bersama .

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Anita Agustina

NPM : 1531040105

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul "**Kebijakan Pemda Kota Bandar Lampung Tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi penelitian pada penanggulangan kemiskinan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Rajabasa)**", adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber didalamnya. Apabila dikemudian hari skripsi saya ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Bandar Lampung , 15 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Anita Agustina

NPM. 1531040105



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: JL. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
(Studi Penelitian pada penanggulangan kemiskinan
melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di
Kecamatan Rajabasa)

Nama : Anita Agustina
NPM : 1531040105
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Effendi, M.Hum
NIP. 195807211986031004

Drs. Agustamsyah, M.I.P
NIP. 196801041994031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN (Studi Penelitian Pada Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Rajabasa)”** Disusun oleh: **ANITA AGUSTINA, NPM: 1531040105**, Program Studi: **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 17 Oktober 2019**

TIM / DEWAN PENGUJI

Ketua : **Abdul Qohar, M.Si** (.....)

Sekretaris : **Eska Prawisudawati Ulfa, M.Si** (.....)

Pembahas Utama : **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** (.....)

Penguji Pendamping I : **Drs. Effendi, M.Hum** (.....)

Penguji Pendamping II : **Drs. H. Agustamsyah, M.I.P** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989031004

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2005)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah. Sujud syukur kepada Allah SWT berkat rahmat sehat yang diberikan pertolongan, serta keridho dari- Nya maka dengan penuh rasa bahagia kupersembahkan skripsi kepada :

1. Kedua orangtua ku tercinta Ayahandaku David Ersoni dan Ibundaku Rofiah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dukungan, kesabaran serta doa yang yang tak pernah putus dalam menghantarkan ku menuju keberhasilan
2. Keluarga Besar Muchrim dan Almarhumah Omaku tercinta yang tak selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan dalam menggapai keberhasilan, dan mengharapkan sesuatu yang baik.
3. Adiku-adiku tersayang Anjar Juliansa Putra dan Anna Marsya Silvia yang menjadi motivasiku untuk berhasil serta para sepupu ku Shintia Nurfadilla, Ramadhani Wulandari, Nurimani Defita, Arthavia, dan Ainun Novira , Al ghafar yang selalu memberikan semangat dan memberikan keceriaan .
4. Orang yang tersayang Yolanda Andes Sucada yang selalu mmeberikan semangat dan motivasi untuk mencapai keberhasilan
5. Teman- teman seperjuangan ku yang selalu menemani dalam proses Diniyati Agustin, Nadia Intan Permatasa, Ayu Meta, Veiga Meidian, Dede Choiriah
6. Almamaterku tercinta Uin Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Anita Agustina, lahir di Bandar Lampung, 22 Agustus 1997 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah David Ersoni dan Ibu Rofiah .Penulis mengawali pendidikan pertama Sekolah Dasar 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung (2003-2009). Kemudian melanjutkan ke tingkat SMP Negeri 28 Bandar Lampung (2009-2012), dan kemudia penulis melanjutkan pendidikan nya di SMK Negeri 1 Bandar Lampung (2012-2015). Pada tahun 2015, penulis resmi terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universities Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur (PMA).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pada bulan Juli 2018 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sinar Waya Pringsewu dan peneliti berpindah lokasi KKN di desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : “ **KEBIJAKAN PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN (Studi penelitian pada penanggulangan Kemiskinan melalui Model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)**”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan pengikut yang taat pada ajaran-ajaran agama- Nya.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung dan Alhamdulillah telah dapat peneliti selesaikan sesuai dengan rencana

Dalam upaya penyelesaian ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada ;

1. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dan Pembantu Dekan beserta Stafnya.
2. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku ketua prodi pemikiran politik islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs.Effendi, M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Drs. Agustamsyah, M.IP selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmunya, memotivasi, memberikan bimbingan dan pengarahan.
4. Bapak dan ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

5. Kepala perpus UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah banyak membantu, menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kabid Dinas Sosial Bagian pemberdayaan melalui KUBE, pendamping lapangan Kelompok Usaha Bersama dan masyarakat(anggota) kelompok usaha bersama yang penulis jadikan objek penelitian.
7. Teman-teman jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2015 yang telah membantuku, memotivasi menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN kelompok 217 Sumber Jaya Lampung Selatan yang telah memberikan motivasi selama KKN.
9. Almamaterku Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas amal kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian. Penulis juga menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan semoga skripsi ini berguna bagi diri penulis khususnya dari pembaca pada umumnya, amin.

Bandar Lampung, 06 September 2019
Penulis,

Anita Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Alat Pengumpulan Data.....	12
J. Teknik Analisis Data Kualitatif	13

BAB II Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin

A. Konsep Kebijakan	14
1. Pengertian Kebijakan.....	14
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
3. Tipe-TipeKebijakan.....	18
4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	19
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan	22
B. Pemerintahan Daerah.....	23
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	23
2. Kewenangan Pemerintah Daerah	24
3. Asas-Asas Pelaksanaan Pemda	25
C. Pemberdayaan Masyarakat Miskin	28
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Miskin	28
2. Penyebab Kemiskinan Masyarakat.....	31
3. Masyarakat Yang Tergolong Miskin.....	37
4. Kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUBE.....	41
D. Tinjauan Pustaka	44

BAB III Pemda Bandar Lampung dan Kebijakan Pada Masyarakat Miskin

A. Gambaran Umum Profil Kota Bandar Lampung	46
1. Letak Geografis	46
2. Organisasi Pemda Kota Bandar Lampung	46
B. Gambaran Umum Kecamatan Raja basa	49
1. Sejarah Singkat Keacamatan Rajabasa	49
2. Letak Geografis	52
C. Kebijakan Pemerintah Melalui Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program KUBE	54
1. Kebijakan Pemerintah Yang Diperankan dan Dijalankan Oleh Dinas Sosial	54
2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai Teknis Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung	56
D. Struktur Organisasi Kelompok Usaha Bersama	59

BAB IV Analisa Tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Kebijakan Pemerintah

A. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama	62
B. Program Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Rajabasa	66
C. Pengelolaan agar Program Bantuan KUBE Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Berjalan Efektif	71
D. Kesesuaian Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	73
E. Faktor Pendukung dan Penghambat program Kelompok Usaha Bersama	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Bandar Lampung	47
Tabel 3.2 Nama Pejabat dan Karyawan Kecamatan Rajabasa.....	51
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian	53
Tabel 3.4 Struktur Kelompok Usaha Bersama.....	59
Table 4.1 Jenis Usaha Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Rajabasa.....	68
Tabel 4.2 Daftar Warga Rajabasa yang mengikuti Kelompok Usaha Bersama	70
Tabel 4.3 Daftar Responden masyarakat terhadap Program KUBE.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Pedoman wawancara dan Transkrip Wawancara

1. Pedoman wawancara.....90
2. Hasil Wawancara dengan pendamping Lapangan91
3. Hasil Wawancara masyarakat Anggota Masyarakat Kelompok Usaha Bersama.....94

Lampiran B. Surat-Surat

1. Surat Konsultasi Bimbingan
2. Surat Persetujuan Pembimbing Skripsi
3. Surat Rekomendasi penelitian ke Kesbangpol
4. Surat Penelitian dari Kesbangpol
5. Surat keterangan Plagiarisme



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengawali penyusunan skripsi dibutuhkan arah yang jelas agar alur penelitian lebih terfokus dan terarah. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi skripsi ini penulis akan menyajikan judul skripsi dengan judul “**KEBIJAKAN PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN(Studi Penelitian Pada Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)**”, untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu kiranya mempertegas dan memberikan penjelasan baik maksud maupun istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas secara rinci sehingga dapat di mengerti dan diminati untuk dibahas oleh pembaca.

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut amara raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pengelolaan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijaksanaan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang di tetapkan

sebelumnya.”Jadi kebijakan atau kebijaksanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan itu diambil¹.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri². Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidak mampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi.³

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu SDM yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Salah satu Kota yang masih memiliki permasalahan mengenai kemiskinan yaitu Kota Bandar Lampung.

Tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung telah mengalami penurunan dari bulan dalam jangka waktu 1 tahun antara tahun 2018 hingga tahun 2019. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut, dipengaruhi dari program-program dan

¹Prof Dr. H. Solichin Abdul Wahab *Analisis kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

² Rosmedi dan Riza Risianti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang : Alqaprit Jatinegoro)

³Khosman, Ali et al, *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan hak bagi setiap warga Negara dan tanggung jawab penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan. Melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung berupaya mengambil langkah-langkah konkrit guna menangani permasalahan-permasalahan sosial termasuk keluarga miskin. Untuk itu dalam mengurangi penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki peran dalam menanggulangi kemiskinan dengan banyak kebijakan, salah satunya yaitu upaya penanggulangan kemiskinan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kota Bandar Lampung memiliki 20 Kecamatan yang terdiri dari 126 kelurahan. Berdasarkan uraian dan keterangan di atas bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini adalah penulis akan meneliti dan membahas pengawasan yang belum ada pada pengeluaran kebijakan untuk memberdayakan masyarakat miskin pada program Kelompok Usaha Bersama yang ada di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dan juga Orang-orang yang termasuk dalam anggota atau masyarakat tersebut rata-rata malas dalam mengikuti program nya, adanya ketidak tepat sasaran pada program Kelompok Usaha Bersama juga maka dari itu program tersebut menjadi tidak efektif dan tidak berjalan sepenuhnya.

B. Alasan Memilih Judul

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah masalah sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-hal menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Telah banyak penelitiannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pemerintah namun khusus berkaitan pemberdayaan masyarakat miskin perlu terus-menerus dikembangkan penelitiannya.
2. Pemerintah masyarakat miskin memiliki program pengentasan kemiskinan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin kementerian sosial antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Mengingat program pemberdayaan tersebut mempunyai anggaran modal untuk program kelompok usaha bersama namun tidak juga memberikan dampak yang diinginkan.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa Negara-negara di dunia khususnya di Indonesia .kemiskinan merupakan keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi.⁴

⁴Khosman, Ali et al, *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu SDM yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Salah satu Kota yang masih memiliki permasalahan mengenai kemiskinan yaitu Kota Bandar Lampung.

Kemiskinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Permasalahan kemiskinan yang masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan Provinsi Lampung. Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin khususnya di Provinsi Lampung menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1,06 juta orang (12,62 persen)⁵.

Kemiskinan yang berada di wilayah perkotaan Provinsi Lampung menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Provinsi Lampung. Sesuai dengan peran dan tugasnya, yakni menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yakni bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial⁶.

⁵ Bps Kota Bandar Lampung 2019

⁶ Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah penyelenggara Otonomi Daerah dalam bidang Kesejahteraan Sosial*

Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas. Melalui kebijakan otonomi daerah, beban dan tugas-tugas pemerintah pusat yang tidak perlu dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Hal ini lah yang menjadikan kemiskinan sebagai masalah sosial yang cukup menjadi perhatian dan disinilah peran pemerintah melalui dinas sosial dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program salah satunya yaitu upaya penanggulangan kemiskinan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Upaya penanggulangan kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibantu melalui dana yang langsung ditransfer ke rekening KUBE, yaitu stimulan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan merupakan salah satu media untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin guna meraih kesempatan bekerja, berusaha sekaligus dapat mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan mereka dapat memperbaiki taraf hidup dan mengembangkan wilayahnya dari ketertinggalan menjadi lebih baik. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan wadah pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah melalui kelompok (berjumlah 5-10 KK) ⁷.

⁷ Sumber, program yang diterapkan Dinas Sosial

Peneliti memilih Kebijakan Pemda kota Bandar Lampung terhadap masyarakat miskin melalui penanggulangan kemiskinan dengan Model Kelompok Usaha Bersama di kota Bandar Lampung secara partisipatif Sehingga dampak positif dari KUBE yaitu anggotanya dapat meningkat taraf kesejahteraan sosial dan ekonominya. Kriteria sasaran pemberdayaan fakir miskin, diantaranya keluarga miskin (sangat miskin/ miskin/ hampir miskin), rumah tangga penerima beras miskin (raskin), keluarga miskin yang mempunyai kartu miskin atau kartu pengganti keluarga miskin, rumah tidak layak huni. Sebaliknya, setelah adanya kebijakan penggunaan KUBE tidak terlepas dengan menimbulkan dampak negative diantaranya yaitu dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering di salah gunakan, dan lamanya dana yang dialokasikan turun dan masuk ke rekening KUBE.⁸

Dinas Sosial saat sosialisasi dalam penyaluran dana tersebut meminta agar anggota KUBE membuat 1 usaha atau lebih disini di kecamatan Rajabasa memiliki 3 Kelompok Usaha Bersama yang didalam 1 kelompok memiliki 10 orang anggota termasuk ketua kelompoknya guna melanjutkan kehidupan mereka agar lebih sejahtera, tetapi dengan adanya program tersebut peneliti ingin meneliti keefektifan dalam pengelolaan program untuk kesejahteraan pada masyarakat miskin. Program tidak berjalan dengan efektif dikarenakan dari anggota atau SDM Nya sendiri. dalam program ini juga adanya factor pendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah dengan adanya bantuan dana modal kepada Kelompok Usaha Bersama dan adanya pengawasan dan bimbingan teknis lainnya dan juga

⁸ Research 26 Agustus 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung oleh Bapak M Hafiz

Yang menjadi penghambat dalam program ini ialah dari mereka malas dan dana yang didapat tersebut bukan untuk usaha tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya dan kurangnya pengawasan dari pendamping lapangan. Walaupun bantuan tersebut turun dalam 6 bulan sekali kalau tujuan dari dinas sosial tidak dilaksanakan oleh anggota KUBE maka perekonomian keluarga tersebut tidak akan berkembang.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui program penanggulangan Kelompok Usaha Bersama Kelompok (KUBE) guna mensejahterakan masyarakat dalam perekonomian dan mengurangi pengangguran di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ke efektifan program Kelompok Usaha Bersama untuk kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Rajabasa?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan pemda dalam pemberdayaan masyarakat miskin?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ke efektifan program bantuan Kelompok Usaha Bersama untuk masyarakat miskin di Kecamatan Rajabasa.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat program dan mendorong pemberdayaan kebijakan yang ditetapkan Pemda Kota Bandar Lampung

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang kebijakan Pemda Kota Bandar Lampung tentang pemberdayaan masyarakat miskin, dan dapat pula digunakan sebagai peneliti lebih lanjut.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang membutuhkan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁹ Untuk mencapai hal tersebut maka dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan metode penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaan nya penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field

⁹ Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, *Metodologi Penelitian social*, Jakarta Bumi Aksara, 2001, h.42

research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok social, individu, lembaga atau masyarakat¹⁰. Dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait kebijakan Pemda Kota Bandar Lampung tentang pemberdayaan masyarakat miskin.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Prastya Irawan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan.¹¹ Penelitian ini hanya menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

2. Sumber Data

Proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses kegiatan objek yang diteliti .oleh karenanya memerlukan sumber data yang benar- benar memahami masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹² Sumber data primer adalah data utama dalam

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,1997)h.1.

¹¹ Prastya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta,Setiawan Pers,1999),h.60.

¹² Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta)h.38

suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil interview dengan informan-informan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Bagian Pemberdayaan bapak Hafiz dan juga masyarakat penerima bantuan program Kelompok Usaha Bersama yang berjumlah 3 Kelompok Usaha Bersama masing-masing kelompok memiliki 10 orang anggota.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang fungsinya memperkuat data Primer. Data ini diperoleh langsung dari orang yang terlibat dengan dikeluarkan nya kebijakan pemda kota Bandar Lampung tentang salah satu program yang dikelola oleh Dinas Sosial yang di dampingi oleh Tenaga kerja Sosial, ibu vivi yang mendampingi masyarakat untuk pemberdayaan penanggulangan kemiskinan dengan Model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) .

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seorang ingin elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian nya merupakan penelitian populasi¹³. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi. Populasi dalam penelitian ini ialah 3 Kelompok Usaha Bersama masing-masing kelompok memiliki 10 orang anggota.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* Jakarta, Rineka Cipta, 1998, h.115

b. Sample

Sample adalah bagian wakil populasi yang diambil. Sample adalah bagian atau wakil populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Untuk mewakili keseluruhan populasi yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian ini maka diperlukannya sampel guna untuk menggambarkan keadaan populasi keseluruhannya supaya lebih mudah peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Sample pada penelitian ini ialah masing-masing Ketua Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Rajabasa.

I. Alat Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah pengajuan secara intensional atau bertujuan suatu hal, khususnya untuk pengumpulan data dan merupakan suatu verbalisasi mengenai hal-hal yang diamati. Dalam hal peneliti mengadakan langsung pengamatan terhadap kelompok usaha tersebut, peneliti mendatangi langsung kecamatan Rajabasa, Pendamping tenaga kerja sosial kecamatan Rajabasa dan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2) Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, khususnya kebijakan Pemda Bandar Lampung tentang

pemberdayaan masyarakat miskin peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat, pendamping Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Rajabasa Di Kota Bandar Lampung.

3) Dokumentasi

Guba dan Lincoln menjelaskan “dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun sebuah rekaman seperti film yang sering kali di butuhkan seorang peneliti.¹⁴Peneliti Disini mengambil gambar langsung dilapangan kegiatan yang terjadi dan juga merekam langsung hasil kegiatan yang di dapat peneliti. Agar lebih memudahkan bagi peneliti.

J. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data dapat digunakan penulis dalam penelitian karya ilmiah ini adalah analisa data kualitatif karena pendekatan kualitatif sangat menarik, sebab penulis langsung ikut serta di kegiatan yang sedang diteliti data yang dikumpulkan berupa konsep dan bukan angka yang bertujuan untuk memudahkan dan memahami data-data yang ditetapkan dalam penelitian¹⁵. Selain melakukan analisa data, maka langkah selanjutnya penulis menarik kesimpulan kualitatif dengan mempergunakan cara berpikir induktif menarik kesimpulan dari khusus ke umum¹⁶. Data yang akan peneliti analisis yaitu merupakan data kualitatif dan dengan cara menganalisis tersebut menggambarkan sebuah kata-kata dengan menyimpulkannya.

¹⁴ J Lexy Moleong ,*Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosdakarya,2012) hal 2016-2017.

¹⁵ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia, 1997) h.269

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985) jilid 1, h.143



BAB II

Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin

A. Konsep Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.¹⁷

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi saling pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

¹⁷Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta 2008 h.45.

- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

Istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” ,”kebijakan ekonomi jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokrtisasi dan deregulasi namun baik Solihin Abdul Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design.¹⁸

2. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum,

¹⁸Abdul wahab, Solihin, Analisis kebijakan public, Malang : UMM Press, 2010,h 34.

dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.¹⁹ Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang

¹⁹Winarno, Budi, Kebijakan public(Teori, proses, dan studi kasus), Yogyakarta : Buku seru, h.12

dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan public sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan public sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.

Begitupun dengan Chandler dan Plano yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu

bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Tipe- Tipe Kebijakan Publik

a. Tuntutan kebijakan (policy Demands)

Kelompok kebijakan yang menelaah bagaimana kebijakan itu lahir, masalah apa yang mendasari suatu keputusan , dan sebagainya.

b. Keputusan kebijakan (policy decision)

Setelah mengetahui masalah yang harus segera diatasi agar pembangunan berjalan seimbang, maka dikeluarkanlah keputusan kebijakan .keputusan akan menentukan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah.

c. Pernyataan kebijakan (policy statements)

Keputusan kebijakan dikeluarkan secara resmi harus ada pernyataan kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat

misalnya, ada masalah kerugian atau kelangkaan BBM naik maka pemerintah mengeluarkan pernyataan terlebih dahulu.

d. Keluaran kebijakan (policy output)

Output kebijakan berkaitan dengan dijalankannya suatu kebijakan dari tingkat atas hingga masyarakat.

e. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)

Hasil akhir kebijakan harus jelas agar tujuan tercapai, contoh mengenai kenaikan BBM naik maka semua penjual menaikkan harga. dalam beberapa bulan selanjutnya arus terlihat hasil akhirnya. Mampukah kenaikan BBM mengatasi masalah kelangkaan BBM.²⁰

4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno adalah sebagai berikut:

²⁰ Ibid, h.17

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum²¹

5. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga

²¹Ibid, h.27.

dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidakdiharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat

pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan

unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.²²

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu. Kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;

²²Perda UU No 32 Tahun 2004, Pemerintahanan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintah

- k. Pelayanan pertahanan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan

Melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah kompleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan profesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang dikelolanya.

3. Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintah Daerah

f. Asas Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti lepas dan Centrum yang artinya pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Menurut Pasal I butir (7) UU No. 12 tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Saligman dan Van Den Berg menganggap bahwa desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan (urusan) pemerintah pusat kepada daerah (Gadjong, Ruitter berpendapat bahwa desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Sementara Litvack berpendapat bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah .

RDH Koesoemahatmaja sebagaimana dikutip Ridwan, menyatakan bahwa desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Dilihat dari beberapa pandangan para pakar di atas, desentralisasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu: pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.²³

²³Dr. M.R. Khairul Muluk, Desentralisasi Pemerintahan Daerah, Malang, 2010. h.28.

Desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara mandiri, karena kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah hanya pemerintah daerah yang mengetahuinya lebih mendalam yang bermanfaat dalam efektifitas suatu kebijakan yang mengatur masyarakat

g. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus daripada sentralisasi. Menurut Leica Marzuki, dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegdheid*, yakni pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Amrah Muslimin berpendapat bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Kertasapoetra mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabat (bawahannya) di daerah.

h. Asas Tugas Pembantuan (*Madebewind*)

Koesoemahatmadja mengertikan tugas pembantuan sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar

menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut .

Ridwan memberikan pengertian bahwa tugas pembantuan adalah pemerintah menugaskan kepada pemerintah daerah otonom untuk ikut serta melakukan kewenangan urusan pemerintah dengan batasan-batasan pertanggung jawaban, dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan atau desa serta dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

C. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Secara etimologi, pemberdayaan masyarakat kota terdiri dari tiga suku kata, yang pertama kata pemberdayaan, kata ini memiliki kata dasar daya yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya, kemampuan untuk melakukan usaha²⁴. Kemudian mendapat imbuhan ber, sehingga menjadi kata berdaya yang berarti memiliki kemampuan atau kekuatan. Dari kata berdaya yang telah mendapat imbuhan ber kemudian diberikan imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi kata pemberdayaan yang memiliki dua arti, yakni

²⁴Pius A Partanto, M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah populer (Surabaya : Arkola, 1994), h.94

memberikan kekuatan atau kemampuan dan menjadikan seseorang memiliki kemampuan atau kekuatan.

Kedua, kata masyarakat yang berarti sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ketiga adalah kata kota yang berarti daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat 'people-centered, participatory, empowering, and sustainable'.

Secara terminologi, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat kota, di antaranya adalah Sumodiningrat, menurutnya, pemberdayaan masyarakat kota adalah upaya untuk memandirikan yang tinggal di kota lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing.

Menurut Kartasmita pemberdayaan masyarakat kota adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tinggal di kota yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²⁵ Korten mendefinisikan pemberdayaan dengan peningkatan kemandirian masyarakat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal masyarakat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal, pemberdayaan juga berarti meningkatkan

²⁵ Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk rakyat*, 23.

keadaan sosial.²⁶ Menurut Gibson, pemberdayaan adalah sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan nyata. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin kota adalah suatu upaya untuk memandirikan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing.

Penguatan masyarakat diarahkan untuk melihat peluang yang berkembang di lingkungan kelompok dan masyarakat global agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan pribadi, kelompok, dan masyarakat global. Upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai juga ditegaskan oleh Siswanto, ia menegaskan bahwa secara empirik, banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat lebih mampu mengidentifikasi, menilai dan memformulasikan permasalahannya baik fisik, sosial kultur maupun ekonomi dan kesehatan lingkungan, membangun visi dan aspirasi dan kemudian memprioritaskan, intervensi, merencana, mengelola, memonitor dan bahkan memilih teknologi yang tepat. Masyarakat kota yang dimaksud adalah masyarakat miskin yang hidup dan tinggal di perkotaan.

2. Penyebab Kemiskinan Masyarakat

²⁶Totok Mardikanto, Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public (Bandung : Alfabeta, 2012), h.70.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang telah ada sejak dahulu kala dan nampaknya akan tetap menjadi masalah aktual hingga kini. Oleh sebab itu, meskipun telah dilakukan program pengentasan kemiskinan, namun hingga kini kemiskinan masih tetap ada. dalam memahami kemiskinan, terdapat dua paradigma atau teori besar (grand theory), yakni paradigma Neoliberal dan Sosial Demokrat.²⁷ Namun ada satu paradigma lagi untuk memahami kemiskinan, yaitu paradigma Agama (Wahyu).

Para pendukung Neo-liberal berpendapat bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat 'residual', sementara, dan hanya melibatkannya keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran Negara hanyalah sebagai 'penjaga malam' yang baru boleh ikut terlibat apabila lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.²⁸

Sedangkan teori demokrasi-sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori ini

²⁷ B.S. Siswanto, Manajemen Tenaga kerja Indonesia (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h.17.

²⁸ Suharto, Analisis kebijakan public : panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial

berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran dan ekonomi manajemen-permintaan.²⁹

Pendukung demokrasi-sosial berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar, melainkan juga bebas dalam penentuan pilihan-pilihan (choice). Dengan kata lain, kebebasan berarti kemampuan (capabilities) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁰

Sementara berdasarkan wahyu, kemiskinan memiliki kata-kata yang sepadan dengan kata miskin, kata-kata tersebut adalah, al-ba'sa', al-sa'il, al-d{a'if, al-faqr, dan al-qan i'. Kata al-ba'sa' adalah merupakan isim jamak yang mufradnya adalah al-bu's, kata al-bu's berarti kesulitan, al-bu's juga berarti kesulitan dalam kehidupan.³¹ Kata al-sa'il berarti mencari, meminta, menghendaki dan mengemis. Kata al-d{a'if merupakan isim sifat yang berlawanan dari kuat, atau dengan kata lain berarti lemah. Kelemahan ini bisa pada jiwa, badan dan keadaan. al-faqr adalah bentuk isim masdar yang berarti hilangnya sesuatu dari anggota badan dan anggota lainnya. Kata itu digunakan untuk orang fakir, karena

²⁹Ibid., 140.

³⁰Ibid., 141

³¹Ahmad Wirson Munawwir, Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta : pondok pesantren al-Munawwir, 1984), 54

seakan-akan orang fakir itu tulang belakangnya retak disebabkan kerendahan dan kemiskinan.³²

Secara istilah kata miskin berarti من لا يزيد ما يكفيه و اسكنه الفقر artinya orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dandiamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya, dikatakan tidak memperoleh sesuatu, karena ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan serta ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak. Orang miskin adalah orang yang berproduksi namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah,³³ yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin³⁴. Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi beberapa para madzhab fiqih berpendapat: menurut madzhab Syafi'i: orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Menurut Madzhab Hanafi dan Maliki

³² Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis al-laughah (Beirut, Lebanon: Darr al-fikr, 1970), 443.

³³ B.s. Siswanto, Manajemen tenaga kerja Indonesia, 12.

³⁴

berpendapat, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun juga. Menurut Madzhab Hambali, orang miskin ialah orang yang mempunyai harta hanya seperdua dari keperluannya atau lebih sedikit tetapi tidak mencukupi untuk seluruh keperluan nafkahnya. Tidak semua masyarakat kota diberdayakan, karena tidak semuanya butuh pemberdayaan, hanya mereka yang tingkat ekonominya di bawah standar saja yang butuh diberdayakan. Mereka yang sudah berdaya hanya dibutuhkan perannya untuk ikut membantu masyarakat miskin yang belum berdaya. Di dalam literature lain, kemiskinan bisa disebabkan oleh :

a. Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini merupakan mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas, seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak berkeinginan untuk bekerja atau bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Bersikap malas akan cenderung menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung hidup mereka.

b. Pendidikan yang terlampau rendah Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan/keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di

atas, dia miskin' karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

c. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang/masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.

d. Keterbatasan sumber daya alam Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan, bahwa masyarakat miskin karena memang dasarnya 'alamiah miskin'. Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya, dengan demikian layaklah apabila miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.

e. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di Negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka

miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal seseorang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran akan modal.

f. Etos kerja yang rendah

Rendahnya etos kerja seseorang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kebiasaan hidup santai dan hanya suka menikmati tanpa mau bekerja keras dan faktor-faktor lainnya yang banyak ditemukan dimasyarakat.

g. Salah faham terhadap ajaran agama Islam

Salah faham terhadap ajaran Islam ini meliputi beberapa hal yang dianggap umum terjadi, kalau kita pelajari secara seksama, ada beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat ekonomi umat Islam, yang paling menonjol dan paling dasar adalah kesalahan mengamalkan ajaran Islam yang pada awalnya akan menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Kesalahan ini, terutama disebabkan oleh kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap ajaran Islam. Praktek ajaran yang biasanya diyakini oleh mayoritas umat Islam, dan terlebih lagi mereka yang taat beragama, tidak menyentuh tuntutan kemajuan ekonomi di dunia, yaitu ajaran yang pada intinya menjauh dari hiruk pikuk keduniaan dan memfokuskan pada keakheratan berupa ibadah murni yang justru mendapatkan penekanan oleh para mubaligh dan ustadz. Ini berarti terjadi banyak kontradiksi antara ideal ajaran Islam dengan pemaknaannya dan

sekaligus prakteknya, kontradiktif antara sasaran inti dari ajaran dengan pemahamanyang kemudian menghambat kemajuan keduniaan dengan relita umat yangterbelakang dalam berbagai aspek.

3. Masyarakat yang tergolong miskin

Berdasarkan kriteria biro pusat statistik, yaitu masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi standart tertentu dari kebutuhan dasar baik makanan atau bukan makanan. Standart ini disebut garis kemiskinan, yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.Sementara itu, secara internasional dipakai standart berdasarkan Bank Dunia yang menetapkan kemiskinan absolut atau mutlak, yaitu hidup dengan pendapatan di bawah 1 USD per hari.

Cara pengukuran standart kemiskinan ini adalah cara pengukuran kemiskinan absolut. Sedangkan cara pengukuran standart kemiskinan relative adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan pihak lainnya.³⁵ Terdapat beberapa bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab dan asal mula kemiskinan itu sendiri, di antaranya ialah:

a. Kemiskinan alamiah

³⁵Sumodiningrat, Santoso dan Maiwan, Kemiskinan, Teori, Fakta dan kebijakan (Jakarta : IMPAC,1999),3.

Kemiskinan alamiah ini adalah kondisi miskin karena tidak memiliki sumber daya alam dan manusia yang memadai maupun disebabkan oleh faktor alami, seperti cacat, sakit, usia lanjut, dan karena bencana alam.

b. Kemiskinan structural

Kemiskinan struktural ini adalah kemiskinan yang terjadi karena faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural ini adalah kemiskinan yang mengacu kepada sikap dan gaya hidup, seperti malas, boros, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Kemiskinan kultural cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi sebagai berikut :³⁶

- 1) Sistem ekonomi dan produksi yang berorientasi pada keuntungan.
- 2) Tingginya tingkat pengangguran bagi tenaga tidak terampil.
- 3) Rendahnya upah buruh.
- 4) Tidak berhasilnya kelompok golongan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya.

Adapun ciri-ciri dari pengaruh kemiskinan kultural ini pada wargamiskin menurut Lewis adalah: 1) kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin terhadap lembaga masyarakat karena perasaan ketakutan, kecurigaan maupun apatis, 2) pada tingkat komunitas

³⁶Parsudi Suparlan, Kemiskinan di perkotaan (Jakarta : Yayasan Obor, 1993),5.

lokal, secara fisik ditemui di pemukiman padat, penuh sesak dan kumuh serta rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti, 3) pada tingkat keluarga, ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurangnya pengasuhan oleh orang tua, hidup bersama atau kawin bersyarat, dan memiliki kecenderungan ke arah keluarga matrilineal, 4) pada tingkat individu, ciri-ciri utamanya adalah kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan dan rendah diri. Tidak semua masyarakat kota diberdayakan, karena tidak semuanya butuh pemberdayaan, hanya mereka yang tingkat ekonominya di bawah standar saja yang butuh diberdayakan. Mereka yang sudah berdaya hanya dibutuhkan perannya untuk ikut membantu masyarakat miskin yang belum berdaya. Di dalam literature lain, kemiskinan bisa disebabkan oleh:

1) Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini merupakan mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas, seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak berkeinginan untuk bekerja atau bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Bersikap malas akan cenderung menggantung hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung hidup mereka.

2) Pendidikan yang terlampau rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan/keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di atas, dia 'miskin' karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

3) Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang/masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.

4) Keterbatasan sumber daya alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan, bahwa masyarakat miskin karena memang dasarnya 'alamiah miskin'. Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya, dengan demikian layak jika apabila miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.

5) Keterbatasan modal

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negaranegarayang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinanpada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seorang miskin sebabmereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahandalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatutujuan untuk memperoleh penghasilan.Keterbatasan modal seseorang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak berujung dari segi penawaran.³⁷

4. Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

a. Program Kelompok Usaha Bersama

Kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.Secara sosial, KUBE menjadi wadah bergabungnya warga masyarakat keluarga miskin, sehingga memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis.

³⁷Abu Ahmad, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta : PT. RINEKA Cipta,2009), 345.

Melalui KUBE warga masyarakat keluarga miskin dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal balik, yang pada akhirnya memikat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, memberi kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses.

Keberadaan kelompok terkait dengan harapan orang untuk memenuhi kebutuhan yang tak dapat dilakukannya sendiri untuk dapat memenuhi kelompok usaha bersama dengan cara berkolaborasi dengan orang lain. Seseorang akan tetap berada dalam kelompok sepanjang masih percaya bahwa menjadi bagian dari kelompok tetap lebih menguntungkan dibanding meninggalkannya. Program KUBE-FM dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan kesejahteraannya. Melalui program KUBE-FM, mereka dapat dibantu untuk memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. Kelompok Usaha Bersama merupakan sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam meningkatkan pendapatan), memotivasi keluarga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta

memperkuat budaya kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana ekonomi.

Tujuan program secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sasaran program Kelompok Usaha Bersama adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki pencaharian tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, kesehatan, dan pendidikan).

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas yang melaksanakan program. Adapun dinas terkait yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab program KUBE di sajikan oleh Dinas Sosial di setiap daerah.³⁸

b. Tujuan Kelompok Usaha Bersama

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui :

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.

³⁸ Wawancara di Dinas Sosial Bagian Program KUBE Pada Tanggal 25 Agustus 2019

- 2) Peningkatan pendapatan atau peningkatan kemampuan anggota kelompok KUBE didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari ditandai dengan :meningkatkan pendapat keluarga, meningkatkan kualitas pangan, sandang, papan kesehatan tingkat pendidikan; dapat melaksanakan kegiatan keagamaan; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan kebutuhan social lainnya.
- 3) Pengembangan usaha
- 4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar atau meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota dalam usaha-usaha kesejahteraan social dilingkungannya

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai sebuah upaya dimana untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil skripsi yang ditulis permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan karya ilmiah yang menjelaskan tentang pragmatisme politik dan menjadi sebuah acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Skripsi dengan berjudul **“Peran Kube Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** oleh Ria Rizqy Wardianti, Universitas Islam

Radin Intan Lampung tahun 2014. Perbedaan nya dalam skripsi Ini membahas peran nya Kube dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Skripsi ini dengan berjudul “ **Kebijakan Pemerintah Dalam Bentuk Pemberdayaan**” oleh Harry Prima Putra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2012. Perbedaannya dalam skripsi ini membahas kebijakan pemerintah nya dalam bentuk pemberdayaan program PNPM untuk di Bandar Lampung.
3. Skripsi ini dengan berjudul “ **Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Bandar Lampung**” oleh Hikmawaty Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung tahun 2002. Perbedaannya dalam skripsi ini membahas tentang peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial upaya penanggulangan kemiskinan.

BAB III

Pemda Bandar Lampung Dan Kebijakan Pada Masyarakat Miskin

A. Gambaran Umum Profil Kota Bandar Lampung

1. Letak Geografis

Kota Bandar Lampung, terletak antara 3°45'-6°45' lintang selatan dan 103°40'-105°50' bujur timur, merupakan wilayah di Pulau Sumatera, yang berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Propinsi Lampung, selain merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, Sosial Politik, Pendidikan dan Kebudayaan, juga merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang secara ekonomis menguntungkan pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung, yaitu sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Dengan letaknya yang strategis, di mana Propinsi Lampung sebagai daerah lalu lintas dan transit berbagai kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa.

Hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung berkembang cukup pesat dalam wilayah Propinsi Lampung. Luas wilayah Kota Bandar Lampung 197,22 km² yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Kota Bandar Lampung saat ini menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Bandar Lampung per-Kecamatan (Km²)

No	Kecamatan	Ibukota	Jml. Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Teluk Betung Barat	Bakung	6	8,89

2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	10	7,30
3	Panjang	Panjang Selatan	7	21,16
4	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	10	6,15
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	5	9,37
6	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7	5,31
7	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	6	15,14
8	Kemiling	SumberRejo	6	25,02
9	Kedaton	Kampung Baru	7	5,26
10	Rajabasa	Rajabasa	4	13,02
11	Tanjung Senang	Tanjung Senang	4	11,63
12	Sukarame	Sukarame	6	14,75
13	Sukabumi	Sukabumi	6	11,64
14	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6	5,62
15	Way Halim	Way Halim	6	2,12
16	Langkapura	Langkapura	5	2,63
17	Enggal	Enggal	6	3,00
18	Kedamaian	Kedamaian	7	14,18
19	Teluk Betung Timur	Teluk BetungTimur	6	12,10
20	Bumi Waras	Bumi Waras	6	2,93

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2019*³⁹

2. Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

a. Walikota

Walikota merupakan kepala daerah untuk daerah kota yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan kota yang ditetapkan bersama-sama dengan DPRD. Walikota merupakan sebuah jabatan politis bukan Pegawai Negeri Sipil yang sejajar dengan Bupati dalam daerah kabupaten dan dipilih melalui Pemilihan Umum Daerah (PILKADA).

b. Sekertaris Daerah

Sekretaris Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

³⁹ Bps Kota Bandar Lampung 2019

Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu walikota dibidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintah umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain, serta mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Fungsi Sekretaris daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya ialah, sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis Daerah
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
- 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat daerah membawahkan 4 (empat) Asisten meliputi

- 1) Sistem Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - b) Bagian Hubungan Masyarakat
 - c) Bagian Hubungan Kerjasama
- 2) Asisten Kesejahteraan dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a) Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
 - b) Bagian Agama dan Pendidikan
 - c) Bagian Administrasi Kemasyarakatan

- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Bagian Administrasi Pembangunan
 - b) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
 - c) Bagian Administrasi Perekonomian
- 4) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a) Bagian Hukum
 - b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 - c) Bagian Keuangan

B. Gambaran Umum Kecamatan Rajabasa

1. Sejarah Singkat Kecamatan Rajabasa

Wilayah Kecamatan Rajabasa semula merupakan pemekaran dari kecamatanInduk, yaitu Kecamatan Kedaton berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4Tahun 2001 tentang Penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran WilayahKecamatan dan Kelurahan Di Kota Bandar Lampung menjadi berjumlah 13kecamatan dan 98 kelurahan. Tujuan dari pemekaran kecamatan dankelurahan, khususnya Kecamatan Rajabasa adalah dalam rangka meningkatkankegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil gunaserta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur pendorong yangkuat bagi usaha peningkatan pembangunan, juga sarana memperpendekrentang tali kendali pelayanan kepada masyarakat.Sehingga dengan ditetapkan dan disahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2001 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan

Kelurahan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dan dengan dilantiknya Drs. Gumsoni, AS, M.Si sebagai Pejabat Camat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 821.22/08/02.7/2001 tanggal 29 Desember 2001, tentang Pelantikan Pejabat Camat Kecamatan Rajabasa, maka Kecamatan Rajabasa resmi terbentuk, kemudian ditindaklanjuti dengan peresmian pada tanggal 9 Februari 2002, yang dipusatkan di Kecamatan Rajabasa oleh Bapak Walikota Bandar Lampung Drs. H. Suharto beserta wakil ketua DPRD Kota Bandar Lampung Drs. M. Jimo yang dihadiri oleh MUSPIDA, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain. Kecamatan Rajabasa telah beberapa kali mengalami pergantian kepala wilayah, antara lain

- a. Drs. Gumsoni, AS, M.Si
- b. Drs. Eddyar Saleh
- c. Paryanto, S.IP
- d. Drs. M. Natsir Effendy
- e. Drs. Suhardi Syamsi, S.E, M.Hum
- f. Yuswinardi, S.Sos
- g. Socrat Pringgodanu, S.Stp, MM

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan roda pemerintahan, Kecamatan Rajabasa didukung oleh Pegawai yang sampai dengan sekarang berjumlah sebanyak 45 orang pegawai, yang terdiri dari 21 orang PNS, 18 orang Tenaga Kontrak dan 2 orang TKS .yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Nama Pejabat dan Karyawan Kecamatan Rajabasa Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1.	Socrat Pringgodanu, S.Stp, MM	Camat
2.	Riana Apriana, AP,MM	Sekcam
3.	Drs. Abu Hasan	Kasi Trantib
4.	Sudhi Haryo Sasongko, SE	Kasi Pembangunan
5.	Hi. A. Rahman, SE	Staf Pembangunan
6.	Hi. Darsono, S.sos	Kasubbag Keuangan
7.	Onisimus Koritelu, S.IP	Kasi Pemerintahan
8.	Nasution AL, S. Ag	Kasi Yanmum
9.	Inda Malia, SE	Staf Pemerintahan
10.	Baina	Kasubbag PMEP
11.	Muhamad Tarmizi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12.	Zairi Bakar	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
13.	Helina Kesuma, SE	Staf Pemerintahan
14.	Anton	
15.	Sriyono	Staf Subag Umum dan Kepegawaian
16.	Koryati	Staf Subag PMEP
17.	Zulfikar	Staf Subag Keuangan
18.	Siti Handayani	
19.	Dewi Triana	Staf Subag Umum dan Kepegawaian
20.	Eka Muthia Rahmani	
21.	Santo Lantana	Staf Yanmum

Sumber :File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa⁴⁰

2. Letak Geografis

Ibukota Kecamatan Rajabasa adalah di Kelurahan Rajabasa, dengan luaswilayah kecamatan sekitar 1.302 Ha, yang terdiri atas 7 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Gedung Meneng 143 Ha

⁴⁰ Data Arsip Dokumentasi Kecamatan Rajabasa

- b. Kelurahan Gedung Meneng Baru 84 Ha
- c. Kelurahan Rajabasa 100 Ha
- d. Kelurahan Rajabasa Pemuka 134 Ha
- e. Kelurahan Rajabasa Nunyai 125 Ha
- f. Kelurahan Rajabasa Raya 358 Ha
- g. Kelurahan Rajabasa Jaya 358 Ha

Kecamatan Rajabasa merupakan salah satu dari dua puluh kecamatan dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Kedaton dimana pada tahun 2001 terjadi pemekaran dan dibentuk kecamatan tersendiri. Kecamatan ini memiliki luas wilayah seluruhnya 1.302 hektar. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rajabasa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Natar, Lampung Selatan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kemiling dan Langkapura
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Natar, Lampung Selatan
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Labuhan Ratu dan Tanjung Seneng

Secara geografis Kecamatan Rajabasa merupakan daerah daratan yang sebagian besar merupakan lahan pertanian tadah hujan. Kecamatan Rajabasa dengan luas daerah 1.302 Ha sebagian besar digunakan untuk lahan perumahan / pemukiman dan areal pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

- a. Demografi

Penduduk Kecamatan Rajabasa terdiri atas berbagai suku bangsa(Heterogen), sampai Tahun 2013, Jumlah penduduk Kecamatan Rajabasasebanyak 45.421 jiwa yang terdiri dari 21.627 laki-laki dan 23.794perempuan. Penyebaran penduduk di Kecamatan Rajabasa hampir merata.

b. Sosial Ekonomi

Hampir sebagian penduduk di Kecamatan Rajabasa bermata pencaharian sebagai buruh, pedagang dan PNS yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	2,317	2,569	4,866
2.	TNI/POLRI	228	31	259
3.	Pedagang	1,569	1,194	2,790
4.	Petani	383	195	578
5.	Nelayan			
6.	Buruh	3,185	1,703	4,888
7.	Pensiunan	543	483	1,026
8.	Jasa	2,377	1,835	4,212
9.	Lain-Lain	3,856	6,379	10,235
	JUMLAH	14,465	14,389	28,845

Sumber : File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa

c. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan bersifat Heterogen, karena hampir sebagian besar adalah pendatang yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya dan tingkat pendidikan yang beragam. Sebagian besar penduduk Kecamatan Rajabasa memeluk Agama Islam.

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Rajabasa sebagian besar adalah berpendidikan setingkat SMA.

C. Kebijakan Pemerintah Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dengan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1. Kebijakan Pemerintah Yang Diperankan Oleh Dinas Sosial

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung⁴¹ jelas diterangkan bahwa dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadikewenangan pemerintah kepala dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengartikan bahwasanya dinas sosial merupakan implementasi kinerja pemerintah daerah dalam kesejahteraan. Provinsi Lampung yang memiliki tingkat pembangunan dan pengembangan wilayah yang cukup besar juga memiliki potensi besar dalam permasalahan sosial. Dimana ketika kita berbicara tentang persoalan sosial, maka keadaan yang dituntut adalah bagaimana masyarakat Provinsi Lampung dapat sejahtera dengan adanya Dinas Sosial.

⁴¹Perda No 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

Dinas Sosial sebagai perumus kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial pastinya akan membuat rumusan terkait persoalan sosial yang terjadi di Provinsi Lampung.

Hal demikian merupakan langkah awal untuk memperbaiki dan atau mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin lama semakin menjadi persoalan yang meresahkan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial yang dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan sosial di Provinsi Lampung.

Maka diperlukan pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial; pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi, pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Provinsi, penanggulangan korban bencana skala provinsi; pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlanjar dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan pelayanan administratif. Ini jelas sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 13 Tahun 2009.

2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai Teknis Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung

KUBE adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri. Saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan tinggal dalam satuan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Pada dasarnya program bantuan sosial dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, namun juga bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Diharapkan dengan adanya program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat tidak hanya bergantung pada lahan pertanian, mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya luas lahan pertanian. Maka program bantuan sosial yang digulirkan Dinas Sosial Provinsi Lampung menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibantu melalui dana yang langsung ditransfer ke rekening KUBE, yaitu stimulan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan merupakan salah satu media untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin untuk dapat meraih kesempatan bekerja, berusaha sekaligus dapat mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya dan mengembangkan wilayahnya dari ketertinggalan menjadi lebih baik.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan wadah pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah melalui kelompok (berjumlah 5-10 KK) secara partisipatif, sehingga anggotanya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonominya. Kriteria sasaran pemberdayaan fakir miskin, diantaranya :

- a. Keluarga miskin (sangat miskin/miskin/hampir miskin);
- b. Rumah tangga penerima beras raskin;
- c. Keluarga miskin yang mempunyai Kartu Miskin atau Kartu Pengganti Keluarga Miskin;
- d. Rumah tidak layak huni.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan perkotaan melalui pendekatan KUBE. Bantuan stimulasi usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin melalui KUBE, berjumlah Rp. 20.000.000,00 perkelompok di transfer melalui kelompok dengan menggunakan rekening KUBE. Tujuan didirikannya KUBE ini, yakni :

- a. Tersedianya wadah pengembangan sosial bagi keluarga fakir miskin;
- b. Meningkatkan pendapatan keluarga fakir miskin anggota KUBE;
- c. Terbangunnya jaringan kerja KUBE dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Meningkatnya kemampuan SDM anggota KUBE melaksanakan peran dan fungsi keluarga, memberikan jaminan dan perlindungan bagi anggotanya;

- e. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat fakir miskin;

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2019,yaitu :

- a. Bimbingan sosial pendamping sosial KUBE;
- b. Sosialisasi program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan perkotaan;
- c. Verifikasi sasaran penerimaan bantuan tahun 2015 dan penjajagan lokasi sasaran penerima bantuan tahun anggaran 2016;
- d. Bimbingan teknis pendamping KUBE (1 angkatan);
- e. Bimbingan teknis KUBE (10 keluarga pada 2 kabupaten/kota)
- f. Bantuan KUBE penumbuhan sebanyak 500 kk dengan pola transfer, besar bantuan rp. 20.000.000,00/ KUBE;
- g. Seleksi pendamping sosial KUBE untuk tahun anggaran 2016;
- h. Bantuan operasional pendamping sosial KUBE;
- i. Penyusunan laporan kegiatan 2015;
- j. Penyusunan rencana dan proposal program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan perkotaan untuk tahun anggaran 2016;
- k. Monitoring dan evaluasi penerimaan bantuan.

Dasar-dasar KUBE, yakni :

- a. Mendukung bagi nilai-nilai kearifan lokal, inisiatif lokal, gotong royong dan semangat komunalitas;
- b. Memperkuat kohesivitas warga;
- c. Memperbesar energi anggota untuk meningkatkan pendapat;
- d. Memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengenal potensi dan sumber yang ada;
- e. Pendampingan menjadi motor penggerak mencapai tujuan kelompok⁴²

D. Struktur Kelompok Usaha Bersama

Pengelola Kelompok Usaha Bersama bertugas mengurus kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah program kegiatan. Pengelola ini berasal dari masyarakat itu sendiri yang mengikuti kegiatan program Kelompok Usaha Bersama Barokah. Sedangkan anggota disini berasal dari warga itu sendiri. Anggota disini merupakan orang yang menjadi bagian dari suatu kegiatan.

Uraian Pokok Dan Tugas Fungsi KUBE :

No	Jabatan	Koordinasi	Tugas Pokok
1.	Ketua	Koordinasi	a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan dan pelaksanaan KUBE b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas atau instansi yang bersangkutan

⁴² Data dari Dinas Sosial Oleh pendamping TKSK

			<ul style="list-style-type: none"> c. Mengajukan laporan/proposal bantuan jika sedang membutuhkan d. Bertanggung jawab kepada yang bersangkutan saat menjalankan fungsinya.
2.	Sekretaris	Administrasi kesekretarian	<ul style="list-style-type: none"> a. Notulen harian b. Menyusun agenda kerja dan juga pertemuan c. Menangani administrasi dan surat menyurat d. Menggantikan posisi ketua jika ketua tidak bias hadir
3.	Bendahara	Administrasi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menangani soal masalah pembukuan b. Melakukan pembayaran tunai kredit c. Membuat laporan keuangan secara berkala
4.	Anggota	Pembantu kegiatan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu tugas-tugas pelaksanaan dari berbagai segi b. Melakukan kegiatan yang sudah dijadwalkan dari rapat dengan ketua, sekretaris, bendahara

Sumber : Ketua Kelompok Usaha Bersama Bandar Lampung

BAB IV

Analisa Tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Kebijakan Pemerintah Melalui KUBE Di Kecamatan Rajabasa

A. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE

Dapat diketahui bahwa proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Rajabasa dapat diketahui bahwa Proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama di kecamatan Rajabasa diawali dengan tahap pengenalan yaitu dengan pembentukan kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan proses pembentukan kelompok usaha bersama di Kecamatan Rajabasa terdapat tiga tahapan yaitu :

1. *Tahap persiapan. Tahap ini meliputi penyuluhan sosial dan kegiatan orientasi dan observasi.*
2. *Tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan, kemudian bimbingan sosial dasar.*
3. *Tahap penyerahan bantuan.*

Dari ketiga tahapan tersebut semuanya didominasi oleh pemerintah (Kemensos dan Dinas Sosial) hal ini terjadi karena pembentukan kelompok usaha bersama di Kecamatan Rajabasa adalah sebagai akibat dari program pemberdayaan fakir miskin yang dicanangkan pemerintah pusat atau Kemensos.⁴³

Menurut Pranarka dalam Priyono yang mengungkapkan bahwa ada 3 fase penting dalam proses pemberdayaan yaitu :

1. Fase Initial
2. Fase Partisipatoris
3. Fase Emansipatoris

⁴³ Hasil wawancara dengan pendamping lapangan Ibu Vivi

Berkaitan dengan waktu dan tenaga, pada fase initial dan tahap penyadaran seperti yang diungkapkan Pranarka dalam Priyono .⁴⁴ bantuan yang bersifat stimulus pada program pemberdayaan fakir miskin atau program tahap pertama akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar hal ini terlihat dari gagalnya 20 dari 30 kelompok usaha bersama yang telah terbentuk di Kecamatan Rajabasa, hal ini berarti hanya 10 kelompok yang berhasil memenuhi indikator keberhasilan proses pengenalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sisi positif dari kegiatan ini adalah 10 kelompok terpilih yang kemudian akan menerima bantuan lanjutan telah siap untuk diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya.

Kemudian untuk pengembangan kapasitas dan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh pihak yang memberdayakan atau pelaku pemberdayaan menurut Suharto (1997) mengatakan bahwa pelaksanaan proses dalam pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

1. Pemungkinan
2. Penguatan
3. Perlindungan
4. Penyokongan
5. Pemeliharaan

⁴⁴Priyono Tjiptoherijanto, Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia, Malang, 2002

Berkaitan dengan pendekatan pemberdayaan diatas sampai saat ini metode yang dijalankan oleh pelaku pemberdayaan dalam hal ini dinas sosial Provinsi adalah penyokongan, perlindungan dan pemeliharaan sementara untuk pemungkinan dan penguatan diserahkan sepenuhnya kepada pendamping lapangan. Dimana langkah-langkah yang diambil oleh pendamping lapangan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Rajabasa adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok.*
2. *Sedangkan dalam administrasi keuangan terjadi penambahan pembukuan seperti Buku Rencana Kegiatan, Kartu Perkembangan Kesejahteraan Anggota KUBE, Buku Penerimaan Bantuan KUBE, Buku Kas, Buku Perkembangan dan Hasil UEP dan Buku Tamu dan Buku Anggota serta Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) yang besarnya antara 2000-5000 rupiah tiap kelompok dan administrasi kelompok sudah bersifat transparan. Usaha peternakan sapi oleh kelompok usaha bersama di Kecamatan Rajabasa masih diusahakan dengan cara pemeliharaan secara tradisional. "Bahwa usaha peternakan bersifat sambilan adalah usaha yang dicirikan oleh skala pengusahaan ternak yang relatif kecil, input biaya produksi yang relatif rendah, kurang berorientasi ekonomi, serta bentuk usahanya bersifat pembibitan dan pembesaran."*⁴⁵

Lebih lanjut Wirosuhardjo dan Priyanti menjelaskan bahwa sistem usaha seperti tersebut belum memperhitungkan semua faktor input produksi seperti curahan tenaga kerja, keluarga, pakan (rumpun) dan sewa lahan untuk bangunan kandang. Pemasaran produksi juga belum berdasarkan target penjualan, akan tetapi pada umumnya lebih ditentukan oleh kebutuhan akan uang tunai.

Gambaran seperti tersebut diatas ditunjukkan dari. Sementara itu didalam perkembangannya kelompok usaha tingkat penguasaan sapta usaha peternakan antara lain, pengetahuan tentang bibit, pengetahuan tentang pakan ternak, sistem

⁴⁵ Hasil wawancara dengan pendamping lapangan oleh ibu vivi

pemeliharaan, cara pengembangbiakan ternak, pengetahuan tentang sistem perkandangan dan peralatan, pengetahuan tentang tatacara pencegahan penyakit, dan pola penanganan pasca panen dan pemasaran, serta jumlah ternak (Skala Usaha) bersama Kecamatan Rajabasa penguasaan sapta usaha peternakan masih sebatas pengetahuan tentang bibit, pakan ternak, sistem pemeliharaan dan cara pengembangbiakkan ternak, sedangkan untuk sistem peralatan dan perkandangan dan pencegahan penyakit masih dalam tahap pendidikan atau pelatihan yang masih sedang dijalankan oleh pendamping lapangan dan beberapa pihak lain dari dinas peternakan serta bantuan dari LSM setempat.

Sementara ini usaha yang dilakukan oleh pendamping lapangan adalah kemitraan. Kegiatan yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak selain pemerintah misalnya tokoh masyarakat yang memiliki modal dan Dinas Peternakan akan sangat membantu memfasilitasi atau memberikan akses kepada kelompok usaha bersama agar bisa bersaing memasarkan produk hasil dari usaha ekonomi produktif mereka.

Kemudian yang terakhir adalah tabungan anggota. Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs).
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan
3. Tingkat keberdayaan yang ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dilingkungannya.

4. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

Dari ketiga kebutuhan dasar tersebut makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya atau didalam ilmu ekonomi biasa kita sebut sebagai konsumsi. Didalam rumus ekonomi pendapatan sama dengan konsumsi, dalam rumus ini berarti berapapun pendapatan yang dihasilkan sama dengan pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi.

Sedangkan fokus utama pendidikan mengenai tabungan untuk kelompok usaha bersama di kecamatan Rajabasa sementara ini masih diperuntukkan untuk anggota, dimana berdasarkan pengamatan peneliti kesadaran akan menabung sangat kurang atau dengan kata lain mereka menabung karena terpaksa dengan aturan yang ada didalam kelompok usaha bersama.

B. Program Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Rajabasa

a. Sejarah Berdirinya Kelompok Usaha Bersama

Program Kelompok Usaha Bersama ini sudah ada sejak lama sejak program ini dikeluarkan oleh Kementrian Sosial, yang mana pada awalnya program ini yang ada di Kecamatan menggunakan anggaran dari Pemerintah Pusat, akan tetapi sejak beberapa tahun belakangan ini di Kecamatan Rajabasa sudah mandiri dalam menjalankan program ini dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah Kecamatan Rajabasa.⁴⁶

b. Pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama

Tentu ada landasan tersendiri dari para anggotanya yaitu berupa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menjadi

⁴⁶ Hasil wawancara dengan pendamping lapangan oleh ibu vivi

alasan anggota sehingga tertarik untuk mengikuti kegiatan kelompok. Alasan tersebut diantaranya :

1) Adanya program simpan pinjam

Program simpan pinjam merupakan program pertama kelompok yang mampu bertahan sampai sekarang. Alasannya adanya sikap saling percaya, kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Jika tidak dilandasi dengan sikap tersebut maka program ini tidak akan mampu bertahan

Seperti yang dibilang oleh ibu kustari selaku ketua kelompok usaha bersama mengatakan bahwa program yang paling diminati untuk bergabung dikelompok adalah program simpan pinjam karena persyaratan dan prosesnya yang tidak susah. Mereka cukup mendaftar sebagai anggota kelompok ini, membayar simpanan pokok kemudian mereka bisa meminjam uang dari kelompok. Tetapi tidak lepas kendali dari sesama anggota yang selalu mengingatkan tanggung jawab peminjam sampai saat ini belum pernah ada anggota yang tidak membayar.

2) Motivasi anggota dalam mengembangkan usahanya dan menambah penghasilan

Motivasi anggota dalam mengembangkan usaha menjadi salah satu faktor yang mendorong anggota untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi pada kelompok. Kehadiran kelompok ini merupakan media untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok,

mendayagunakan potensi dan sumber-sumber ekonomi lokal, memperkuat kebudayaan kewirausahaan, dan juga menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.⁴⁷

ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantara faktor penghambat itu adalah rasa malas. Faktor kemalasan ini merupakan faktor utama anggota dalam pelaksanaan program pemberdayaan, karena menurut salah satu anggota dirinya sudah sibuk sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengikuti program tersebut.

Rasa malas ini juga karena masih adanya anggapan masyarakat bahwa apa yang diusahakan dan didapatkan sudah menjadi ketetapan (takdir). Pandangan malas dan pasrah inilah yang menjadi kendala pelaksanaan pemberdayaan ekonomi. Sebagian anggota lebih suka program simpan pinjam tetapi ketika diajak membuat usaha dibidang pengolahan makanan terkadang ada beberapa anggota kurang berminat.

Faktor pendukung KUBE ini adalah program simpan pinjam serta motivasi dari anggota untuk mengembangkan usaha dan pendapatan. Dan faktor penghambatnya ialah rasa malas dari anggota itu sendiri. Namun faktor malas ini lebih keprogram pelatihan ketrampilan untuk pengembangan usaha mikro kecil tetapi untuk program pertemuan rutin dan simpan pinjam masih diminati oleh para anggota.⁴⁸

Program KUBE yang ada di Kecamatan Rajabasa ini hanya ada beberapa kelompok saja, diantaranya sebagai berikut :

Jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE di Kecamatan Rajabasa

Tahun anggaran 2018-2019

NO	NAMA KUBE	JENIS KUBE	KELURAHAN
1	Barokah	Kerajinan tas dan pernak pernik lainnya yang terbuat dari kain tapis	Rajabasa Raya
2	Mawar	Peternakan Sapi	Rajabasa nyunyai
3	Jaya Abadi	Keripik pisang	Rajabasa pemuka

⁴⁷ Kementrian Sosial RI (2010), Pedoman Kelompok Usaha Bersama

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Kustari

Sumber : Pendamping Program Kelompok Usaha Bersama⁴⁹

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa ada 3 kelompok KUBE yang ada di Kecamatan Rajabasa. Dari 3 kelompok di atas yang masih aktif sampai saat ini adalah kelompok Barokah. Bahkan kelompok Barokah pernah mendapatkan sertifikat penghargaan karena telah membuat kerajinan tas dan pernak pernik lainnya dari tapis karena mayoritas masyarakat kecamatan Rajabasa Lampung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya KUBE ini sangat membawa dampak yang sangat baik untuk masyarakat sekitar. Peran dari KUBE sendiri ini selain bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, KUBE ini juga berperan mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju lagi untuk mensejahterakan keluarga mereka.

Akan tetapi, kelompok Jaya Abadi, Mawar ini kegiatannya kurang aktif dikarenakan selain masyarakat yang kurang antusias akan program pemberdayaan masyarakat ini, mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka sebagian Pedagang pakaian diluar kota. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Siswanto mengatakan :

“saya bukan kurang berminat sama program ini,” tapi saya kadang sudah kecapean pulang dari dagang jadi saya malas buat kumpul ikutan program tersebut. walaupun kegiatan itu tidak setiap hari tapi kadang saya susah membagi waktunya. Saya ikutan program ini tapi saya pribadi kurang aktif mengikutinya”.⁵⁰

Bukan itu saja barang-barang yang dimiliki oleh kelompok Delima dan kelompok Mawar ini sudah banyak yang hilang dan rusak karena

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pendamping Lapangan Ibu VIVI pada tanggal 25 Agustus

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Siswanto pada tanggal 25 Agustus 2019

kurangnya rasa tanggung jawab dan banyak dari mereka kurangnya rasa saling memiliki barang kelompok mereka sendiri sehingga barang-barang tersebut tinggal sedikit yang hanya bisa dipergunakan kembali.

“Kurangnya rasa tanggung jawab inilah yang menyebabkan KUBE ini tidak berjalan baik terus juga ditambah bapak-bapak ini sibuk dengan masing-masing.”⁵¹

Jadi dari ke tiga kelompok tersebut semuanya masih aktif hanya saja dua kelompok yaitu Jaya Abadi dan Makmur yang hanya saja kurang seaktif seperti kelompok lain dikarenakan dari masyarakatnya sendiri yang kurang produktif.

Daftar Warga Rajabasa Raya yang masih Aktif Mengikuti Program Kelompok Usaha Bersama Barokah (Seperti Kerajinan Membuat tas dan Pernak-pernik lainnya dari Tapis :

Kelurahan Rajabasa Raya

Kelompok Usaha Bersama Barokah (Kerajinan tas. Dan pernak – pernik lainnya dari kain tapis)

NO	NAMA	USIA
1	KUSTARI	40
2	LELA PUSPITA	31
3	SRI M	30
4	HERWANA	25
5	SURYATI	45
6	MARSYIAH	34
7	SYAMSI AH	29

Sumber : Ibu Kustari hasil wawancara dengan ketua Kelompok Usaha Bersama⁵²

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Siswanto

3) Tujuan Kelompok Usaha Bersama ini diarahkan untuk upaya menangani permasalahan kemiskinan melalui :

“Dengan adanya program Kelompok Usaha Bersama untuk di Kecamatan Rajabasa ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan minat berwirausaha pada anggota KUBE dan masyarakat.*
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*
- c) Menjadi wadah bagi anggota dan masyarakat untuk mengembangkan diri.*
- d) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota.*
- e) Mengatasi kemiskinan anggota dengan dengan peningkatan penghasilan”⁵³*

C. Pengelolaan agar Program Bantuan KUBE Untuk Program

Penanggulangan Kemiskinan Berjalan dengan Efektif

a. Pengelolaan dengan cara bimbingan sebagai Berikut :

1. Bimbingan sosial pendamping sosial KUBE; Sosialisasi program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan perkotaan;
2. Verifikasi sasaran penerimaan bantuan tahun 2015 dan penjajagan lokasi sasaran penerima bantuan tahun anggaran 2016;
3. Bimbingan teknis pendamping KUBE (1 angkatan);
4. Bimbingan teknis KUBE (10 keluarga pada 2 kabupaten/kota)
5. Bantuan KUBE penumbuhan sebanyak 500 kk dengan pola transfer, besar bantuan rp. 20.000.000,00/ KUBE;
6. Seleksi pendamping sosial KUBE untuk tahun anggaran 2016;
7. Bantuan operasional pendamping sosial KUBE;
8. Penyusunan laporan kegiatan 2015;
9. Penyusunan rencana dan proposal program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan perkotaan untuk tahun anggaran 2016;
10. Monitoring dan evaluasi penenerimaan bantuan Masyarakat Miskin Berjalan dengan Efektif.⁵⁴

b. Cara Penggalan Dana

Pada awalnya terbentuknya KUBE ini kelompok belum memiliki dana

kemudian disepakati setiap anggota mengadakan iuran pokok Rp. 10.000.,

⁵² Sumber wawancara dengan ibu Sri Kustari

⁵³ Hasil wawancara dengan pendamping lapangan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan pendamping lapangan oleh ibu Vivi

iuran wajib Rp. 5.000, seiring berjalannya waktu modal kas kelompok

semakin meningkat sehingga dapat dibuat untuk kegiatan simpan meminjam.

“masyarakat disini mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk modal Selain dana yang dimiliki oleh kelompok, kelompok mendapatkan bantuan dana yang dialokasikan pemerintah untuk setiap kelompok KUBE sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pada akhir 2018 salah satu kelompok KUBE mendapatkan lahan untuk berternak dari Dinas peternakan, mudah-mudahan dengan adanya lahan ini kegiatan usaha kelompok semakin maju dan dapat Berkaitan dengan pendekatan pemberdayaan“⁵⁵.

sampai saat ini metode yang dijalankan oleh pelaku pemberdayaan dalam hal ini

dinas sosial Provinsi adalah penyokongan, perlindungan dan pemeliharaan

sementara untuk pemungkinan dan penguatan diserahkan sepenuhnya kepada

pendamping lapangan. Dimana langkah-langkah yang diambil oleh pendamping

lapangan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Rajabasa adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok.
2. Sedangkan dalam administrasi keuangan terjadi penambahan pembukuan seperti Buku Rencana Kegiatan, Kartu Perkembangan Kesejahteraan Anggota KUBE, Buku Penerimaan Bantuan KUBE, Buku Kas, Buku Perkembangan dan Hasil UEP dan Buku Tamu dan Buku Anggota serta Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) yang besarnya antara 2000-5000 rupiah tiap kelompok dan administrasi kelompok sudah bersifat transparan.

Usaha peternakan sapi oleh kelompok usaha bersama di Kecamatan Rajabasa masih diusahakan dengan cara pemeliharaan secara tradisional. “Bahwa usaha peternakan bersifat sambilan adalah usaha yang dicirikan oleh skala pengusahaan

⁵⁵ Hasil wawancara pendamping lapangan oleh ibu vvi

ternak yang relatif kecil, input biaya produksi yang relatif rendah, kurang berorientasi ekonomi, serta bentuk usahanya bersifat pembibitan dan pembesaran meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

D.Kesesuaian Pelaksanaan Program Kube Dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Kecamatan Rajabasa

Program KUBE dibentuk guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya sehingga nantinya dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada. Program yang dilaksanakan oleh KUBE adalah berbeda-beda setiap kelompoknya. Kelompok usaha bersama mempunyai berbagai macam kegiatan yaitu sering diadakan pertemuan sebulan sekali atau terkadang dua kali, yang dimana setiap pertemuan ini digunakan untuk saling berbagi satu sama lain atau membahas untuk menampung permasalahan yang sedang anggota rasakan. Selain itu ada kegiatan yang sering dilakukan adalah pelatihan-pelatihan seperti berikut ini :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kelompok selalu melakukan kegiatan rutin pertemuan setiap sebulan sekali, yang dimana dalam setiap pertemuan ini dilakukan pelatihan manajemen keuangan dan kewirausahaan selain itu juga semakin mempererat tali persaudaraan, rasa kepedulian satu sama lain dan kesetiakawanan sosial.

Pelatihan-pelatihan tersebut untuk menunjang pengetahuan serta pemahaman seluruh anggota kelompok usaha bersama dengan berwirausaha yang dimulai dari kecil-kecilan jika ditekuni usaha itu akan jauh lebih baik dan keadaan ekonomi mereka pun ikut jauh lebih baik. Dan juga mereka berupaya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia disekitar mereka untuk keberhasilan kelompoknya.

2. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha

Dengan adanya program kelompok usaha bersama untuk mempermudah jaringan ekonomi marketing dan pengembangan bisnis lainnya. Misalnya dengan adanya kelompok usaha bersama dengan beberapa anggota yang lainnya akan mempermudah seseorang mengembangkan usaha bisnisnya, dalam hal ini salah satu upaya meningkatkan ekonomi keluarga dan merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam sektor pembangunan ekonomi masyarakat yang saat ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

3. Pembinaan usaha

Kehadiran KUBE selain untuk membantu memberdayakan ekonomi keluarganya ataupun anggotanya juga memberikan solusi kepada anggota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KUBE itu sendiri. Agar dengan diadakannya kegiatan seperti itu diharapkan terwujudnya anggota yang sejahtera.

Selain itu juga mereka juga dapat sharing tentang bagaimana berkembangnya kemandirian dalam berwirausaha sehingga produktifitas

meningkat, pendapatan mereka dapat bertambah, sehingga kehidupan mereka dapat sejahtera.⁵⁶

Dan juga tanda-tanda dari perekonomian yang baik adalah meningkatnya suatu pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya, dengan meningkatnya pendapatan ini maka akan meningkatkan konsumsi. Sementara apabila konsumsi ini lebih baik, maka masyarakat bisa sejahtera baik dari segi sandang, papan dan pangan. Jika sudah sejahtera maka orang akan meningkatkan jumlah produksi dan distribusi barang sehingga akhirnya bisa meningkatkan lapangan kerja agar sedikit demi sedikit banyak keluarga yang ikut merasakan hidup menjadi lebih baik setelah ikut program ini. Sehingga dirasakan peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya diantaranya :

- a. Peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kemampuan intelektual

Kube ini sangat berperan sekali dalam meningkatkan intelektual anggota yang mengikuti program ini karena beberapa anggota berpendapat sebagai berikut :

Ibu Eka mengatakan bentuk program ini menurut saya sangat cocok untuk mengatasi permasalahan bagi masyarakat yang mempunyai masalah soal perekonomian karena sejak saya ikut gabung kelompok ini saya memiliki tambahan ilmu tentang menjadi wirausaha yang baik.”

Ibu Eka berpendapat Bagi saya KUBE ini seperti jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman karena ketika kita berkumpul bersama mereka selain mempererat tali silaturahmi kita juga mempunyai pengetahuan tambahan dari mereka yang lebih lebih pengetahuannya banyak.”⁵⁷

⁵⁶ Kementrian Sosial Ri, Pedoman Kelompok Usaha Bersama

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu Eka

b. Peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kemampuan sosial psikologi

Disini ibu Eka berpendapat *dengan adanya kemampuan psikologi yang baik akan terjalin pula hubungan yang baik satu dengan yang lain karena disini kita bukan hanya sekedar memikirkan diri sendiri tetapisesama anggota KUBE saling member motivasi dalam menjalani usaha yang dilakukannya.Jadi dapat dikatakan bahwa KUBE ini sangat berperan baik untuk psikolog setiap masing-masing anggota karena adanya rasa saling.*⁵⁸

Peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan keterampilan Peran yang ini hampir setiap anggota merasakannya karena hasil sharing satu dengan yang lainnya dan juga sering diadakannya pelatihan dapat menambahkan wawasan baru bagi anggota yang sebelumnya sama sekali tidak mempunyai keterampilan apa-apa. Ibu Kustari mengatakan *“dengan adanya pertemuan yang diadakan sebulan atau dua bulan sekali dapat meningkatkan ketampilan anggota, contohnya seperti keterampilan berbicara didepan umum mulai berani, keterampilan berkreasi dalam membuat makanan yang dapat menjadi nilai jual dan tidak lupa saling memberi semangat satu dengan yang lain”.*⁵⁹

c. Peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya

Adanya program kelompok usaha bersama ini pengelola dan anggota dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga keluarganya.Seperti yang dikatakan ibu Kustari *“kalau semakin berkembang usaha yang kami jalanin maka akan semakin baikpula pendapatan para anggota kami sehingga kerjasama antara pengelola dan anggota sangat dibutuhkan dan harus terjalin dengan baik karena tujuan kami disini sama yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan setiap anggota masing-masing.*⁶⁰

Ibu Eka juga mengatakan *“kerjasama yang yang baik yang terjalin seperti saat ini antara satu dengan yang lain mempermudah meningkatkan usaha kami karena jika tidak ada kerjasama KUBE ini*

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Eka

⁵⁹ Hasil wawancara dengan ibu Kustari

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Kustari

*tidak akan berjalan dengan baik seperti saat ini*⁶¹. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tanggapan Responden Terhadap Program KUBE dalam meningkatkan Kesejahteraan.

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berperan	25	83,33%
2.	Cukup Berperan	5	16,67%
3.	Tidak Berperan	-	-
	Jumlah	39	100%

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa 25 responden atau 83,33% mengatakan usaha program ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan responden, sedangkan 5 responden atau 16,67 % mengatakan cukup penting.⁶²

Adanya program KUBE ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi responden yang tidak memiliki pekerjaan atau yang pekerjaannya serabutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui indikator keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, diantaranya yaitu :

a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan

Pengetahuan dan keterampilan merupakan dua hal yang saling melengkapi dan terkait satu sama lain. Tanpa adanya pengetahuan, keterampilan tidak akan mudah dilaksanakan karena keterampilan sebagai penunjang dari pengetahuan yang didapatkan. Seperti yang diungkapkan ibu Kustari selaku yang menjelaskan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut:

“kegiatan kelompok usaha bersama yang dilaksanakan ini sudah termasuk efektif, sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan ilmu

⁶¹ Hasil wawancara dengan ibu Eka

⁶² Wawancara dengan pendamping TSKS IBU VIVI

pengetahuan dan keterampilan. Yang dulunya saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak mengetahui apa-apa istilahnya semenjak saya ikut gabung dalam kelompok ini banyak ilmu yang saya dapatkan seperti saya sudah bisa membuat usaha keripik.”⁶³

Ibu Eka juga mengungkapkan sebagai berikut :

“saya senang mbak adanya program Kelompok Usaha Bersama yang ada di desa saya ini karena dengan adanya program kelompok ini kehidupan keluarga saya lebih baik karena saya sekarang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baru yang saya miliki selama saya mengikuti program ini dan saya sudah dapat membuka usaha kecil-kecilan dirumah mbak.”⁶⁴

Dari pendapat Ibu Kustari dan Ibu Eka diatas dapat kita ketahui bahwa Kelompok Usaha Bersama ini memberikan pengetahuan dan keterampilan membuat ceriping ketela kepada anggotanya. Dari pengetahuan dan keterampilan ini merupakan indikator kemampuan manusia sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

b. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga

Kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga merupakan dua hal yang saling berkaitan. Mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan hal yang sulit jika ia tidak memiliki kualitas hidup yang baik, kesadaran dan kemauan ia dalam berusaha. Melalui program Kelompok Usaha Bersama ini setiap anggota mendapatkan ilmu yang dapat dijadikan sebagai bekal dalam bersaing di dunia kerja untuk mendapatkan tempat bekerja bekerja sebagai sumber penghasilan. Dari penghasilan yang mereka peroleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang keluarganya perlukan. Mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan yang bersifat sekunder. Terpuhinya kebutuhan hidup sehari-hari setiap anggota ini

⁶³ Hasil wawancara dengan ibu Kustari

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ibu Eka

menjadi tolak umur tingkat kesejahteraan keluarganya. Indikator meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga antara lain yaitu :

Pertama, mendapatkan kesempatan kerja. Keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama di kelurahan Rajabasa Raya ini didukung oleh pendapatnya ibu Kustari dengan terkaitnya keberhasilan program ini yaitu :

“saya hanya ibu rumah tangga yang lulusan SD mbak, tempat kerja mana yang mau menerima saya yang hanya lulusan SD seperti saya ini, yang lulusan SMA seperti sekarang ini aja susah mencari pekerjaan apalagi saya mbak. Kalaupun ada pekerjaan paling sebagai ibu rumah tangga atau buruh. Saya ditawari ikut gabung ke program KUBE Barokah ini saya langsung mau dan yakin bisa mengikutinya dari pada saya nganggur dirumah tidak mendapatkan hasil sama sekali. Ternyata di kelompok ini saya diajarkan keterampilan membuat kerajinan tas dari kain tapis. Setelah saya mengikuti prosesnya dan saya bisa melakukan kegiatan yang saya jalani tersebut saya langsung diikutkan dalam proses produksi. Dan hasil yang saya dapatkan lumayan mbak untuk membantu suami saya.”⁶⁵

Dari pendapat ibu Kustari tersebut dapat diketahui bahwa dengan keyakinan dan kemauan untuk belajar yang ada dalam diri bisa membawanya ke dunia kerja dan bisa mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dirumah. Kedua, meningkatnya pendapatan anggota Kelompok Usaha Bersama. Tujuan setiap orang dalam bekerja adalah ingin mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kebutuhan hidup seperti membeli sembako sehari-hari, menyekolahkan anak mereka, biaya

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Kustari

kesehatan dan kebutuhan yang lain yang tidak terduga. Dan Kelompok Usaha Bersama ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program Kelompok Usaha Bersama

1. Faktor Pendukung :

a. Minat masyarakat mengikuti Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Minat masyarakat mengikuti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera sangat tinggi. Dapat dilihat dari berjalannya Kelompok Usaha Bersama Di Kelurahan Rajabasa Raya yang Kelompok nya Mawar .

Faktor pendukung KUBE dalam menangani kemiskinan seperti yang dikatakan oleh bapak Siswanto

- 1) selalu berperan aktif dalam kegiatan,
- 2) adanya kerjasama dan dukungan dari tokoh masyarakat,
- 3) minat masyarakat untuk berkembang tinggi
- 4) semangat anggota yang tinggi,
- 5) adanya pendamping KUBE,
- 6) sumber daya alam yang melimpah,
- 7) adanya hubungan yang baik antar anggota dan pengelola, dan
- 8) interaksi yang terjadi berjalan dengan baik atas kesamaan tujuan.⁶⁶

Tokoh masyarakat disini sangat mendukung kegiatan ini baik melalui material maupun non material. Seperti yang diungkapkan oleh Sdri. Rs selaku ketua KUBE Sejahtera bahwa: "tokoh masyarakat mendukung, kemarin pas pembuatan kandang juga ikut terlibat, kalau ada apa-apa juga siap membantu".⁶⁷

Seperti yang dikatakan oleh pendamping lapangan program KUBE "respon masyarakat disini di Kecamatan Rajabasa sangat menerima sekali program ini dan bisa membantu dalam perekonomian masyarakat dan bisa menggali potensi dalam keterampilan mereka sangat antusias dalam mengikuti program tersebut"

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Siswanto

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Siswanto

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara di Lapangan dalam program KUBE ada 3 faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan terhadap fakir miskin perkotaan di Bandar Lampung:

- a. Minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam membuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama terkadang untuk membuat buku tabungan mereka harus iuran satu kelompok yang terdiri dari 5-10 KK;
- b. Bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing-masing, sehingga apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Sosial kepada KUBE, ada yang sebagian anggota KUBE nya tidak memahami;
- c. Dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering di salah gunakan. Dinas Sosial saat sosialisasi dalam penyaluran dana tersebut meminta agar anggota KUBE membuat usaha 1 atau lebih guna melanjutkan kehidupan mereka agar lebih sejahtera tetapi ada sebagian kecil karena malas jadi dana yang di dapat tersebut bukan untuk usaha tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Walaupun bantuan tersebut turun dalam 6 bulan sekalikalaupun

tujuan dari Dinas Sosial tidak dilaksanakan oleh anggota KUBE maka perekonomian keluarga tersebut tidak akan berkembang.

“Keterhambatan dalam program ini juga yaitu dengan dana yang dialokasikan pada masyarakat lama masuk ke rekening kube nya mba sampe ngebuat proses kelompok usaha ini kesulitan dapetin modal jalan nya usaha”⁶⁸.

Dinas sosial sedang berupaya untuk membantu menjelaskan dengan sabar kepada anggota KUBE yang tidak mencapai tujuan untuk mensejahterahkan kehidupan mereka. Karena Dinas Sosial dalam menangani fakir miskin berasaskan kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.

Asas-asas tersebut yang menjadi landasan gerak Dinas Sosial dalam menjalankan pendekatan KUBE di masyarakat.⁶⁹

- a. Kemanusiaan, yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- b. Keadilan sosial, Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
- c. Nondiskriminasi, Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto

⁶⁹ Kementerian Sosial RI, Pedoman Kelompok Usaha Bersama

- d. Kesejahteraan, yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.
- e. Kesetiakawanan, Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- f. Pemberdayaan, Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Dari faktor penghambat yang telah dipaparkan dan disejajarkan dengan asas-asas yang berlaku secara perundang-undangan, maka sebenarnya yang harus dilakukan oleh dinas sosial selaku representatif pemerintah adalah memaksimalkan sosialisasi terkait pendekatan KUBE kepada masyarakat agar masyarakat dapat memaksimalkan program KUBE, hal ini juga harus juga dibarengi dengan pemahaman dinas sosial akandiera. Gunanya adalah untuk sampainya pemahaman tentang KUBE yang disampaikan dapat dicerna secara logis oleh masyarakat.

Masyarakat kecamatan Rajabasa dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki harus didampingi dengan baik. Mereka adalah yang paling membutuhkan pendampingan, baik secara berjalannya KUBE ataupun bagaimana pemahaman KUBE sampai kepada mereka. Sehingga tujuan dari KUBE

berjalan dapat tercapai. Apa yang disampaikan dapat diterima atau logis bagi masyarakat daerah akan berdampak pada berjalannya program ini. Hal demikian merupakan salah satu upaya menghindari penyalahgunaan KUBE karena ketidakpahaman program.

Yang sering terjadi dalam menerima modal yaitu tidak tepat sasaran KUBE juga kerap kali terjadi. Tidak tepat sasaran KUBE ini juga diakibatkan dinas sosial yang tidak maksimal dalam pendampingan KUBE yang sudah terdaftar. Jika memang pendampingan sudah benar dijalankan, maka seharusnya dapat dicegah penyalahgunaan penyalahgunaan yang ada. Pendampingan; pencatatan dan pelaporan; serta monitoring dan evaluasi merupakan harus dimaksimalkan guna berjalannya program melalui pendekatan KUBE yang baik dan benar.⁷⁰



⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Siswanto

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian diatas Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) khususnya di Kecamatan Rajabasa :

1. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk bertujuan Memberdayakan masyarakat miskin agar merasakan kesejahteraan melalui program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan efektif dikarenakan dari masyarakat atau SDM nya sendiri yang tidak bisa menjalankan dengan baik Kelompok Usaha Bersama dan menggunakan dana atau modal dari pemerintah digunakan untuk kehidupan sendiri bukan untuk kelompoknya.
2. Faktor pendukung diantaranya karena adanya program simpan pinjam dan adanya perhatian pemerintah tersedianya dana modal untuk masyarakat yang mengikuti program Kelompok Usaha Bersama dan juga ada pendampingan lapangan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pengarahan dalam program kelompok Usaha bersama tersebut .Faktor penghambatnya ialah rasa malas dari anggota itu sendiri. Faktor malas ini adalah faktor utama. Anggota kebanyakan lebih menyukai program simpan pinjam dibanding program untuk membuat usaha dibidang pengolahan makanan dan kerajinan.dan juga Tidak tepat sasaran KUBE ini juga diakibatkan

dinas sosial yang tidak maksimal dalam pendampingan KUBE yang sudah terdaftar.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran terkait peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menangani kemiskinan di KUBE Sejahtera, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengawasan dan pendampingan dalam program Kelompok Usaha Bersama sehingga masyarakat nya tidak bermalasan dalam mengikuti program Kelompok Usaha Bersama dan juga tidak menggunakan dana modal untuk kepentingan kehidupan sendiri.
2. Mengadakan kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pengelola dan anggota KUBE.
3. Pengelola KUBE perlu membangun jiwa kewirausahaan pada anggota yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar agar mereka dapat mandiri dalam bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Solichin Abdul Wahab, 2014. *Analisis kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Sutyastie Soemitro Remi, 2002. *Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta
- Research di Kantor Dinas Sosial Bandar Lampung
- Research Di Kecamatan Rajabasa
- Khosman, Ali et al, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi orang miskin, Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB
- Usman Husain, Purnomo Stiady, amar, 2001. *Metodologi penelitian social*, Jakarta Bumi Aksara
- J lexy Moleony, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012
- Miles dan Hubberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia,
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dadang, supardan, 2009. *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Departemen Sosial RI, Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin 2006.
- Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2008, Panduan TKSK
- Rosmedi dan Riza Risyanti, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang : Alqaprit Jatinegoro,
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan public (Teori dan studi kasus)*, Yogyakarta: Buku Seru.
- Dr. M. R. Khairul Muluk, 2010. *Desentralisasi Pemerintahan Daerah*, Malang.
- Pius A. Partanto, M, Dahlan al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola).
- Totok Mardikanto, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung ; Alfabeta).

Ahmad Wirson Munawwir, 1984, *Kamus Besar Indonesia* (Yogyakarta ; Pondok pesantren al-munawwir)

Sumodiningrat, Santoso dan Maiwar, 2010, *Kemiskinan,Teori,Fakta,dan Kebijakan*, Jakarta : IMPAC

Parsudi ,Suparian, 1993, *Kemiskinan diperkotaan*, Jakarta; Yayasan ob

Sumber Jurnal :

Ria Rizqy Wardianti, 2014,“ Peran Kube Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” , Universitas Islam Radin Intan Lampung

Harry Prima Putra, 2012 “ Kebijakan Pemerintah Dalam Bentuk Pemberdayaan” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Hikmawaty,2002, “ Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Bandar Lampung” Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung

Sumber Internet :

Kelompok Usaha Bersama (On-Line), tersedia di [Http://Kementrian_Sosial_RI_PROFIL_KUBE.html](http://Kementrian_Sosial_RI_PROFIL_KUBE.html) diakses pada tanggal (30 April 2018)

LAMPIRAN



Pedoman Wawancara

1. Untuk Mengetahu awal pembentukan dari program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Rajabasa melalui tahap-tahap pembentukan KUBE
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pendamping lapangan dalam pemberdayaan masyarakat miskin
3. Untuk mengetahui tujuan dari program Kelompok Usaha Bersama
4. Untuk mengetahui pengelolaan agar program Kube dalam penanggulangan kemiskinan berjalan efektif
5. Untuk mengetahui bentuk bantuan dari pemerintah dalam program kube
6. Untuk mengetahui ada berapa jenis usaha yang dijalankan oleh Kube Kecamatan Rajabasa
7. Untuk mengetahui respon masyarakat dalam program Kube
8. Untuk mengetahui program Kube dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan
9. Untuk mengetahui peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kemampuan psikologi sosial
10. Untuk mengetahui ke efektifan Kube dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
11. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam berjalan nya program

TRANSKRIP WAWANCARA (25 Agustus 2019)

a. Identitas Informan

Nama : Vivi Martavia
 Alamat : Rajabasa Raya kec. Rajabasa
 Umur : 45 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Pendamping Lapangan program Kube
 Waktu : Hari ; Senin 26 Agustus, 11.00 sd/selesai
 Tempat : Kantor Dinas Sosial

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana sih bu awal pembentukan dari program Kube di kecamatan rajabasa ini apa ada cara-cara yang harus diterapkan ?

Vivi Martavia : Ada tiga tahapan seperti 1. Tahap persiapan. Tahap ini meliputi penyuluhan sosial dan kegiatan orientasi dan observasi. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan, kemudian bimbingan sosial dasar. 3. Tahap penyerahan bantuan. Dari ketiga tahapan tersebut semuanya didominasi oleh pemerintah (Kemensos dan Dinas Sosial) hal ini terjadi karena pembentukan kelompok usaha bersama di Kecamatan Rajabasa adalah sebagai akibat dari program pemberdayaan fakir miskin yang dicanangkan pemerintah pusat atau Kemensos

Peneliti : Sejak kapan berdirinya program Kube ini dimulai bu ?

Vivi Martavia : Program Kelompok Usaha Bersama ini sudah ada sejak lama sejak program ini dikeluarkan oleh Kementrian Sosial, yang mana pada awalnya program ini yang ada di Kecamatan menggunakan anggaran dari Pemerintah Pusat, akan tetapi sejak beberapa tahun belakangan ini di Kecamatan Rajabasa sudah mandiri dalam menjalankan program ini dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah Kecamatan Rajabasa.

Peneliti : Apa ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pendamping lapangan dalam pemberdayaan untuk masyarakat disini melalui program Kube?

Vivi Martavia : iya mba ada seperti 1. Meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok. 2. Sedangkan dalam administrasi keuangan terjadi penambahan pembukuan seperti Buku Rencana Kegiatan, Kartu Perkembangan Kesejahteraan Anggota KUBE, Buku Penerimaan Bantuan KUBE,

Buku Kas, Buku Perkembangan dan Hasil UEP dan Buku Tamu dan Buku Anggota serta Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) yang besarnya antara 2000-5000 rupiah tiap kelompok dan administrasi kelompok sudah bersifat transparan.

Usaha peternakan sapi oleh kelompok usaha bersama di Kecamatan Rajabasa masih diusahakan dengan cara pemeliharaan secara tradisional. "Bahwa usaha peternakan bersifat sambilan adalah usaha yang dicirikan oleh skala pengusahaan ternak yang relatif kecil, input biaya produksi yang relatif rendah, kurang berorientasi ekonomi, serta bentuk usahanya bersifat pembibitan dan pembesaran

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu sendiri tujuan Kube ini sendiri untuk menangan permasalahan Kemiskinan?

Vivi Martavia : Dengan adanya program Kelompok Usaha Bersama untuk di Kecamatan Rajabasa ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan minat berwirausaha pada anggota KUBE dan masyarakat.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Menjadi wadah bagi anggota dan masyarakat untuk mengembangkan diri.
- d) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota.
- e) Mengatasi kemiskinan anggota dengan dengan peningkatan penghasilan

Peneliti : Bagaimana pengelolaan agar program kube ini sendiri berjalan efektif?

Vivi Martavia : Dengan diadakan nya 1.Bimbingan sosial pendamping sosial KUBE;

Sosialisasi program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan perkotaan; 2.Verifikasi sasaran penerimaan bantuan tahun 2015 dan peninjauan lokasi sasaran penerima bantuan tahun anggaran 2016; 3.Bimbingan teknis pendamping KUBE (1 angkatan); 4.Bimbingan teknis KUBE (10 keluarga pada 2 kabupaten/kota) 5.Bantuan KUBE penumbuhan sebanyak 500 kk dengan pola transfer, besar bantuan rp. 20.000.000,00/ KUBE; 6.Seleksi pendamping sosial KUBE untuk tahun anggaran 2016; 7.Bantuan operasional pendamping sosial KUBE; 8.Penyusunan laporan kegiatan 2015; 9.Penyusunan rencana dan proposal program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan perkotaan untuk tahun anggaran 2016; 10.Monitoring dan evaluasi penerimaan bantuan Masyarakat Miskin Berjalan dengan Efektif

Peneliti : Bagaimana dengan bantuan dana bu, apakah dalam program ini masyarakat mendapatkan bantuan dana dan mendapat dukungan lainnya?

Vivi Martavia : masyarakat disini mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk modal Selain dana yang dimiliki oleh kelompok, kelompok mendapatkan bantuan dana yang dialokasikan pemerintah untuk setiap kelompok KUBE sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pada akhir 2018 salah satu kelompok KUBE mendapatkan lahan untuk berternak dari Dinas peternakan, mudah-mudahan dengan adanya

lahan ini kegiatan usaha kelompok semakin maju dan dapat Berkaitan dengan pendekatan pemberdayaan

Peneliti : Ada berapa dan berapa jenis sih usaha yang dijalankan di program Kube Kecamatan Rajabasa ini bu ?

Vivi Martavia : Ada tiga Jenis usaha Kube di Kecamatan Rajabasa ini mba seperti

Barokah	Kerajinan tas dan pernik pernik lainnya yang terbuat dari kain tapis	Rajabasa Raya
Mawar	Peternakan Sapi	Rajabasa nyunyi
Jaya Abadi	Keripik pisang	Rajabasa pemuka

Peneliti : Bagaimana respon masyarakat terhadap program ini ?

Vivi Martavia : “ yaa mba respon masyarakat disini di Kecamatan Rajabasa sangat menerima sekali program ini dan bisa membantu dalam perekonomian masyarakat dan bisa menggali potensi dalam keterampilan mereka sangat antusias dalam mengikuti program tersebut”

a. Identitas Informan

Nama : Siswanto
 Alamat : Rajabasa Raya kec. Rajabasa
 Umur : 39
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan Di KUBE : Anggota Kelompok Usaha Bersama
 Waktu : Hari : Selasa 28 Agustus 2019, 13:00 sd/selesai
 Tempat : Kediaman bapak Siswanto

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah bapak sebagai anggota dari Kube ini tidak berminat dengan program ini jadi bapak kurang aktif mengikuti Kumpul-kumpul kelompok ?

Siswanto : “Saya bukan kurang berminat sama program ini, tapi saya kadang sudah kecapean pulang dari dagang jadi saya malas buat kumpul ikutan program tersebut. Walaupun kegiatan itu tidak setiap hari tapi kadang saya susah membagi waktunya. Saya ikutan program ini tapi saya pribadi kurang aktif mengikutinya”

Peneliti : Apa yang menyebabkan kelompok usaha bersama bapak ini ini tidak berjalan baik pak ?

Siswanto : “kurangnya rasa tanggung jawab inilah yang menyebabkan KUBE ini tidak berjalan baik terus juga ditambah bapak-bapak ini sibuk dengan masing-masing.”

Peneliti : “Bagaimana dukungan masyarakat dalam program Kube ini pak ?”

Siswanto : “ Dengan Minat masyarakat yang mengikuti program ini 1) selalu berperan aktif dalam kegiatan

- 2) Adanya kerja sama dan dukungan dari tokoh masyarakat
- 3) Minat masyarakat untuk berkembang tinggi
- 4) Semangat anggota yang tinggi
- 5) Adanya pendamping KUBE
- 6) Sumber daya alam yang melimpah
- 7) Adanya hubungan yang baik antar anggota dan pengelola, dan
- 8) Interaksi yang terjadi berjalan dengan baik atas kesamaan tujuan

Peneliti : “ Disini tokoh masyarakat nya mendukung dengan adanya program KUBE ini gak pak ?

Siswanto : “ Tokoh masyarakat disini sangat mendukung kegiatan ini baik melalui material maupun non material “ tokoh masyarakat mendukung kemarin pas pembuatan kandang juga ikut terlibat, kalau ada apa-apa juga siap membantu”

Peneliti : Apakah bantuan dana program yang dari pemerintah ini tepat waktu masyarakat menerimanya?

Siswanto : Keterhambatan dalam program ini juga yaitu dengan dana yang dialokasikan pada masyarakat lama masuk ke rekening KUBE nya mba sampe ngebuat proses kelompok usaha ini kesulitan dapetin modal jalan nya usaha”



a. Identitas Informan

Nama : Nur Kustari
 Alamat : Rajabasa Raya kec. Rajabasa
 Umur : 40
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan di KUBE : Ketua Kelompok Usaha Bersama
 Waktu : Hari : Selasa 28 Agustus 2019, 11;00 sd/selesai
 Tempat : Kediaman Ketua Kelompok Usaha Bersama

b. Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana peran Kube apakah dalam meningkatkan keterampilan berpengaruh untuk masyarakat bu ?

Kustari: “sebelumnya masyarakat tidak tahu dan tidak mempunyai keterampilan dengan adanya pertemuan yang diadakan sebulan atau dua bulan sekali dapat meningkatkan keterampilan anggota, contohnya seperti keterampilan berbicara didepan umum mulai berani, keterampilan berkreasi dalam membuat makanan yang dapat menjadi nilai jual dan tidak lupa saling memberi semangat satu dengan yang lain”

Peneliti : Apakah Kube berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya bu ?

Kustari : “kalau semakin berkembang usaha yang kami jalani maka akan semakin baik pula pendapatan para anggota kami sehingga kerjasama antara pengelola dan anggota sangat dibutuhkan dan harus terjalin dengan baik karena tujuan kami disini sama yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan setiap anggota masing-masing”

Peneliti : Bagaimana menurut ibu ke efektifan program Kube dalam penanggulangan kesejahteraan masyarakat disini?

Kustari : “kegiatan kelompok usaha bersama yang dilaksanakan ini sudah termasuk efektif, sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang dulunya saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak mengetahui apa-apa istilahnya semenjak saya ikut gabung dalam kelompok ini banyak ilmu yang saya dapatkan seperti saya sudah bisa membuat usaha keripik”

Peneliti : Bagaimana dampak dari program Kube adakah meningkatnya kualitas hidup kesejahteraan keluarga?

Kustari : “saya hanya ibu rumah tangga yang lulusan SD mbak, tempat kerja mana yang mau menerima saya yang hanya lulusan SD seperti saya ini, yang lulusan SMA seperti sekarang ini aja susah mencari pekerjaan apalagi saya mbak. Kalaupun ada pekerjaan paling sebagai ibu rumah tangga atau buruh. Saya ditawarkan ikut gabung ke program KUBE Barokah ini saya langsung mau dan yakin bisa mengikutinya dari pada saya nganggur dirumah tidak mendapatkan hasil sama sekali. Ternyata di kelompok ini saya diajarkan keterampilan membuat kerajinan tas dari kain tapis. Setelah saya mengikuti prosesnya dan saya bisa melakukan kegiatan yang saya jalani tersebut saya langsung diikuti dalam proses produksi. Dan hasil yang saya dapatkan lumayan mbak untuk membantu suami saya”

Peneliti : Apakah sangat membantu dalam perekonomian keluarga bu dengan adanya program Kube ?

Kustari : “Tentu saja mba di kelompok usaha bersama ini saya mendapatkan hasil dan dapat membantu keuangan dalam keluarga saya sehingga membantu meringankan beban suami saya

Peneliti : Menurut ibu bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam program ini ?

Kustari : ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantara faktor penghambat itu adalah rasa malas. Faktor kemalasan ini merupakan faktor utama anggota dalam pelaksanaan program pemberdayaan, karena menurut salah satu anggota dirinya sudah sibuk sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengikuti program tersebut.

Rasa malas ini juga karena masih adanya anggapan masyarakat bahwa apa yang diusahakan dan didapatkan sudah menjadi ketetapan (takdir). Pandangan malas dan pasrah inilah yang menjadi kendala pelaksanaan pemberdayaan ekonomi. Sebagian anggota lebih suka program simpan pinjam tetapi ketika diajak membuat usaha dibidang pengolahan makanan terkadang ada beberapa anggota kurang berminat.

Faktor pendukung KUBE ini adalah program simpan pinjam serta motivasi dari anggota untuk mengembangkan usaha dan pendapatan. Dan faktor penghambatnya ialah rasa malas dari anggota itu sendiri. Namun faktor malas ini lebih keprogram pelatihan ketrampilan untuk pengembangan usaha mikro kecil tetapi untuk program pertemuan rutin dan simpan pinjam masih dminati oleh para anggota.